

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2022



**DIREKTORAT SISTEM
PENERAPAN STANDAR DAN
PENILAIAN KESESUAIAN**

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "good governance" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi Lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden. Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) kepada semua pihak yang berkepentingan.

Laporan Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022 merupakan Laporan Kinerja tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Sekretaris Utama BSN Nomor 22/KEP/SESTAMA/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi organisasi dan seluruh Unit Kerja di lingkungan BSN di masa yang akan datang.

Tangerang Selatan, 20 Januari 2023

Direktur Sistem Penerapan Standar
dan Penilaian Kesesuaian

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Konny Sagala'.

Konny Sagala

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan sistem dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah menetapkan Perjanjian Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022 telah menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dan 5 (lima) Indikator Kinerja. Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Pengembangan Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian.

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian tahun 2022 menurut Sasaran:

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi	% Capaian
1. Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan SPK dalam memfasilitasi penerapan SNI dan Penilaian Kesesuaian	1. Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholder	86%	107%	124%
2. Meningkatnya jumlah organisasi pemerintah yang menerapkan tata Kelola SPK	2. Persentase instansi pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2	50%	53%	106%
3. Meningkatnya produk bertanda SNI yang beredar terhadap persyaratan SNI yang di tetapkan	3. Persentase produk bertanda SNI (yang dimonitor) yang memenuhi persyaratan SNI	60%	61,5%	102%
4. Meningkatnya kualitas pelayanan SPPT SNI	4. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan SPPT SNI	3,3	3,6	110%
5. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran	5. Persentase realisasi anggaran Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	≥ 97%	99,72%	103%

Dalam mewujudkan kinerja strategis di BSN, Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah melakukan kolaborasi dan sinergitas (*crosscutting*) dengan unit kerja internal antara lain:

- Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi; Direktorat Akreditasi Laboratorium; Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi; Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal; Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi; dan Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif dalam penyusunan skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, kebijakan penunjukan LPK, fasilitasi penyusunan regulasi teknis dan pemutakhiran daftar SNI wajib.
- Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal; Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi; Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama dan Layanan Informasi; Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum; Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif; Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi; Direktorat Akreditasi Laboratorium; Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi; Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam keikutsertaan personil sebagai perwakilan tim penanganan pemenuhan kewajiban internasional bidang SPK.
- Direktorat Akreditasi Laboratorium; Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi dalam fasilitasi penyampaian posisi Indonesia pada Sidang Komite TBT WTO (*statement ofensif dan defensif*) dalam bentuk relay sidang.
- Kantor Layanan Teknis (KLT) BSN dalam evaluasi tata Kelola Sistem Penilaian Kesesuaian di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah / Provinsi.

Dari 5 (lima) indikator kinerja di Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, seluruhnya telah dilaksanakan dan mencapai target dengan capaian kinerja rata-rata 100%.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja, pada tahun 2022 Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mengelola pagu sebesar Rp. 1,855,318,000,- dengan realisasi sebesar Rp 1,850,106,155,- atau mencapai 99,72%.

Sebagai langkah efisiensi sumber daya pada tahun 2022 beberapa kegiatan dilakukan dengan daring dan di tengah pandemik ini operasional kegiatan dilakukan dengan teleworking, serta peningkatan layanan berbasis digital, sehingga mengurangi biaya belanja bahan, belanja perjalanan dan belanja narasumber.

DAFTAR ISI

Halaman Cover	1
Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	3
Daftar Isi	5
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	6
I.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	6
I.3 Sumber Daya Manusia	8
I.4 Peran Strategis	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
II.1 Perencanaan Strategis	13
II.1.1 Visi dan Misi	13
II.1.2 Tujuan dan Sasaran	14
II.2 Perjanjian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 Capaian Kinerja	17
III.2 Capaian Kegiatan	57
III.3 Realisasi Anggaran	58
BAB IV PENUTUP	
Penutup	60
LAMPIRAN	
I. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
II. Data Masa Transisi SNI Revisi Tahun 2022	
III. Progres PNRT Tahun 2022	
IV. Penetapan PNRT Tahun 2023	
V. Perkembangan Perundingan/Kesepakatan Internasional Bidang SPK	

I.1 LATAR BELAKANG

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi.

Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian sebagai salah satu unit di BSN.

Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Deputy Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dan secara keseluruhan terhadap Badan Standardisasi Nasional (BSN). Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Direktorat SPSPK merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Deputy Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian tahun 2022.

I.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

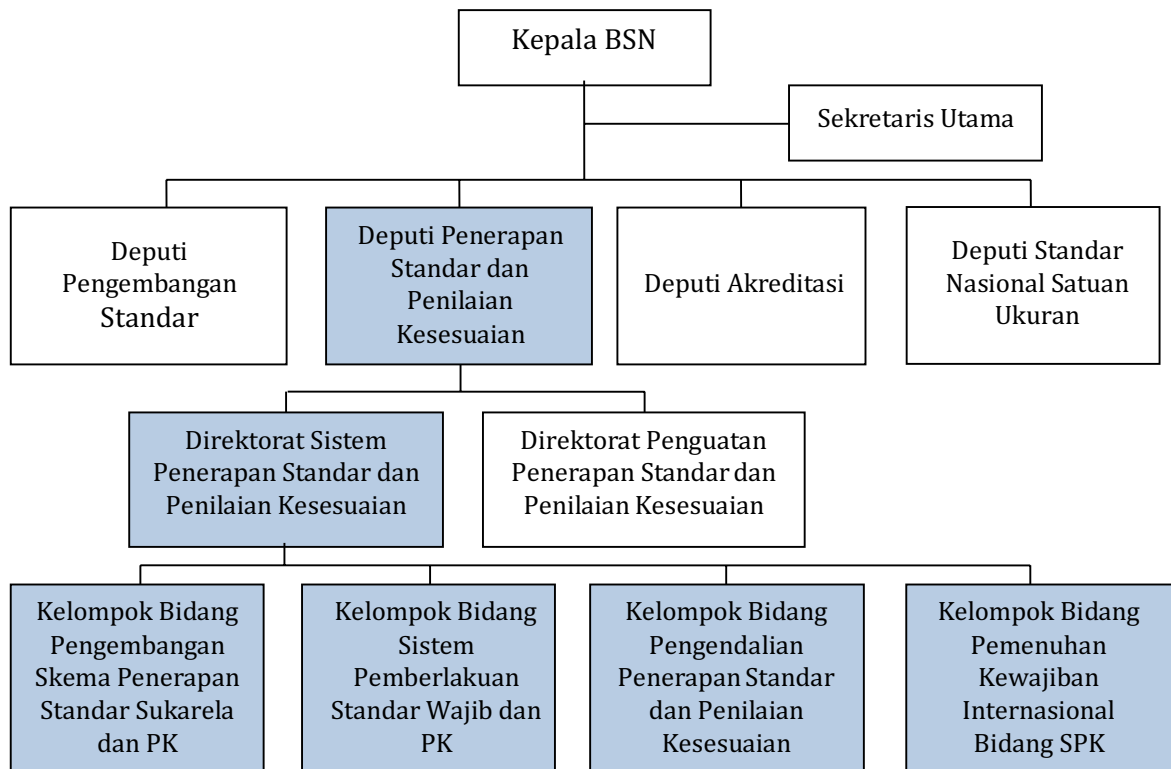
Berdasarkan Peraturan BSN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian adalah melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan sistem dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan skema penerapan standar sukarela dan penilaian kesesuaian, sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian, pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian, serta pemenuhan kewajiban internasional; dan

4. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan sistem dan pengendalian penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

Struktur Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar I.1 Struktur Organisasi Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Badan Standardisasi Nasional melakukan reorganisasi pada bulan Desember 2020, sebagaimana dikeluarkannya Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional. Hal ini diikuti dengan transformasi pejabat struktural pada level eselon III dan IV ke jabatan fungsional tertentu.

I.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2022 Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel I.1
Personel ASN Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

No.	Uraian	Jenjang Pendidikan			Jumlah Orang
		S3	S1	S2	
1.	Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	-	1	-	1
2.	Kelompok substansi Pengembangan Skema Penerapan Standar Sukarela dan Penilaian Kesesuaian	-	5	4	9
3.	Kelompok substansi Sistem Pemberlakuan Standar Wajib dan Penilaian Kesesuaian	1	8	3	12
4.	Kelompok substansi Pengendalian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	-	5	2	7
5.	Kelompok substansi Pemenuhan Kewajiban Internasional Bidang Standar dan Penilaian Kesesuaian	-	5	4	9
Jumlah		1	24	13	38

I.4 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini. Terutama dalam hal peningkatan kualitas produk melalui standardisasi ini akan mampu menghasilkan produk yang berdaya saing sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat dan meningkatkan ketahanan ekonomi rakyat.

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu penyusunan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi kebijakan nasional di bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian berdasarkan rencana pembangunan nasional. Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah mengidentifikasi potensi/isu strategis, permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang telah dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Tabel 1.2
Potensi/Isu Strategis dan Permasalahan
Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

POTENSI/ ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
<p>1. Ditetapkannya Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP 5 tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Usaha berbasis Resiko, PP 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan KUKM, diharapkan dapat memperkuat Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Beberapa aturan yang terkait dengan penerapan SNI secara sukarela perlu ditetapkan dan perkembangan peraturan perundang-undangan terkait kemudahan berusaha, perlindungan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah - Skema sertifikasi yang ditetapkan oleh K/L dalam regulasi teknis masih dinilai menghambat perdagangan (tidak efektif dan efisien) - Potensi duplikasi aturan dan kewenangan dalam Implementasi UUCK dan aturan turunannya - Pengendalian penerapan SNI dilakukan dengan uji petik. Hasil monitoring uji petik menunjukkan masih belum konsistennya kesesuaian produk bertanda SNI yang beredar di pasar terhadap persyaratan SNI. - Masih rendahnya penerapan SNI Bina UMK pada produk UMK 	<ul style="list-style-type: none"> - Diperlukan revidi aturan-aturan tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI yang mengacu kepada skema penilaian kesesuaian dan perkembangan peraturan perundang-undangan terkait kemudahan berusaha, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah - Pengembangan dan implementasi penerapan SNI Bina UMK dalam rangka mendukung UU No. 11 tahun 2020 - penyusunan rancangan pedoman pemilihan metode penilaian kesesuaian dalam regulasi teknis berbasis resiko produk. - Review dan koordinasi aturan UUCK dan turunannya. - Rekomendasi hasil uji petik secara spesifik disampaikan ke LSPro, KAN, pelaku usaha dan Kementerian/ Lembaga terkait untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsinya. - Monitoring penerapan SNI Bina UMK

POTENSI/ ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat SPSPK melaksanakan fungsi penyiapan penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang Sistem Pemberlakuan Standar Wajib dan Penilaian Kesesuaian dalam lingkup memfasilitasi pemberlakuan SNI secara wajib melalui Program Nasional Regulasi Teknis sesuai dengan ketentuan GRP dan RIA. 		
	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pemahaman dan awareness Regulator dalam penyusunan Analisis dampak regulasi teknis dan tata cara pengusulan PNRT - Peraturan pemberlakuan SNI secara wajib yang ditetapkan oleh K/L terkait belum sepenuhnya sesuai dengan GRP - Acuan SNI yang digunakan dan ketersediaan LPK belum dipertimbangkan dalam usulan rencana PNRT. Adanya usulan ST dan PTC dalam PNRT - Masih banyaknya kebingungan stakeholder terkait informasi status penerapan SNI dan ketentuan pemberlakuan SNI wajib 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyusunan Analisis dampak regulasi teknis - Pelaksanaan Koordinasi fasilitasi pembahasan rancangan regulasi teknis dan review skema sertifikasi sesuai sesuai PBSN 7 dan 8 Tahun 2020 dengan melibatkan seluruh komponen stakeholder termasuk pelaku usaha - Awareness terkait lingkup PNRT Sesuai PBSN 7 Tahun 2020, informasi penerapan SNI termutakhir, masa transisi SNI, lingkup LPK terakreditasi, dan skema yang ditetapkan BSN dalam rencana pemberlakuan SNI secara wajib - Sosialisasi dan penyelesaian permasalahan Penerapan SNI secara wajib kepada stakeholder terkait.
<p>2. Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), diharapkan dapat meningkatkan kembali daya saing pelaku usaha yang sebelumnya terpuruk akibat pandemic COVID. Salah satu upaya peningkatan daya saing usaha melalui penerapan standar yang telah dilakukan pada tahun 2021 yaitu pada sektor pariwisata yaitu penerapan SNI CHSE, revitalisasi pasar rakyat dengan sertifikasi SNI pasar rakyat. Namun masih banyak sektor real lainnya yang perlu didukung.</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> - SNI yang ditetapkan belum tentu dapat diterapkan sepenuhnya terutama bagi UMK sehingga menghambat terperolehnya sertifikasi - SNI yang ditetapkan belum sepenuhnya didukung oleh LPK yang terakreditasi oleh KAN 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan skema bagi UMK untuk mempermudah penerapan/sertifikasi SNI bagi UMK - Proses Penunjukkan LPK sebaiknya berkoordinasi dengan fasilitasi pembinaan LPK
<p>3. Direktorat SPSPK melaksanakan fungsi BSN sebagai <i>Notified Body</i> dan <i>Inquiry Point</i> di forum TBT-WTO, memainkan peran penting bersama KL untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia khususnya dalam mengurangi hambatan teknis perdagangan untuk produk-produk yang diekspor ke negara lain</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> - Regulasi yang dinotifikasi sering mendapatkan “concern” dari negara anggota TBT WTO lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> - 16 regulasi teknis telah dinotifikasi ke Komite TBT WTO, terdiri dari 12 notifikasi regulasi dan 4 notifikasi addendum - 5 STC ofensif telah disampaikan pada sidang TBT WTO sebagai

POTENSI/ ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberlakuan kebijakan non tariff terkait dengan standar, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian negara anggota WTO (khususnya EU terkait dengan RED) yang menghambat ekspor CPO Indonesia - Rendahnya kepedulian dan partisipasi aktif <i>stakeholder</i> dalam mengakses regulasi teknis negara lain 	<p>specific trade concern bulan Maret, Juli dan November yaitu kebijakan restriktif India yakni Plain Copier Paper, Pneumatic tyres and tubes for automotive vehicles, hambatan ekspor produk kimia dan olekimia, kebijakan Uni Eropa penurunan maximum residue levels (MRL) pestisida clothianidin and thiamethoxam pada beberapa produk pertanian, serta kebijakan pendaftaran produk GACC ke China</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 STC defensive telah disampaikan pada sidang TBT WTO yaitu kebijakan Jaminan Produk Halal dan regulasi turunan halal, PP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, kebijakan Standar Kinerja Energi Minimum dan Label tanda hemat energi produk elektronik, kebijakan kuota impor dan persyaratan sertifikasi SNI, serta persyaratan sertifikasi SNI pada produk AC - Dilakukan analisis bidang SPK dan memberikan masukan substantif terhadap posisi Indonesia dalam memperjuangkan tuntutan Indonesia dalam kasus sengketa CPO (DS 593) dengan Eropa - Telah dilakukan 13 analisis regulasi yang berpotensi menghambat perdagangan, dan telah dibahas dalam rapat Kelompok Kerja Komnas Hambatan Teknis Perdagangan - Sebanyak 50 publikasi weekly news analisis regulasi teknis di website TBT BSN - tanggapan terhadap 62 enquiry telah disampaikan kepada negara mitra dagang sehingga memastikan pelaku usaha Indonesia tidak terhambat dalam melakukan ekspor - Pembaharuan tampilan dan fitur pada website TBT WTO Indonesia (tbt.bsn.go.id)

POTENSI/ ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan pelatihan pemanfaatan aplikasi ePing alert system WTO kepada asosiasi dan pelaku usaha sektor pangan
<p>4. Sinergi prioritas untuk memastikan bahwa kepentingan Indonesia dapat diwujudkan di forum bilateral (negosiasi (ICA-CEPA, IEU-CEPA, IUEA-CEPA) dan implementasi (IA-CEPA dan IEFTA CEPA)), regional (ASEAN, ASEAN+1, RCEP) dan multilateral (WTO TPR, TFA). Keterlibatan aktif dalam forum-forum ini tidak lain untuk mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan akses pasar dan perlindungan kepada industri dan konsumen nasional. BSN melalui Direktorat SPSPK menjadi lead negotiator dalam perundingan perdagangan internasional bidang SPK. Indonesia saat ini telah memiliki beberapa perjanjian bilateral dan regional terkait standar, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian (STRACAP. Direktorat SPSPK juga memfasilitasi peningkatan ekspor produk Indonesia ke negara mitra termasuk menjaga agar produk-produk dari negara mitra masuk ke Indonesia memiliki kualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan.</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan posisi Indonesia untuk perundingan perdagangan internasional (FTA/CEPA/PTA) bidang SPK masih belum mendapatkan dukungan yang optimal dari institusi/pelaku usaha terkait • Hasil kesepakatan bidang SPK di dalam perjanjian FTA/CEPA/PTA untuk memfasilitasi perdagangan belumdimanfaatkan secara optimal dan terkendala dengan pandemic • Koordinasi unit internal BSN dalam mendukung penyusunan posisi dan pemanfaatan hasil kesepakatan internasional masih perlu ditingkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan sinergi dan koordinasi dengan K/L terkait, Asosiasi dan internal BSN dilakukan melalui rapat koordinasi dan komunikasi melalui media yang ada secara intensif sebelum dan sesudah perundingan berlangsung • Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan K/L, asosiasi dan internal BSN dalam merumuskan program kerja dalam rangka pemanfaatan implementasi hasil perjanjian perdagangan internasional di bidang SPK

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS**II.1.1 Visi dan Misi**

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan pemerintah Republik Indonesia yang harus bekerja secara bersama-sama dan saling bersinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Hal ini berarti bahwa visi BSN harus selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

VISI

“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara komprehensif dan terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun (2020-2024) yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam konteks standardisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, misi Badan Standardisasi Nasional yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 yaitu:

MISI

“Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”

Pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian ini meliputi tahapan :

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan,
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh,
3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global.
4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional.
5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia.
6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Tujuan Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mengacu pada tujuan BSN pada Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

TUJUAN

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global	Indeks pemenuhan produk terhadap SNI (rata-rata), dengan target sd 2024 sebesar 70%.

Sasaran yang dimaksud merupakan sasaran di lingkungan Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian selaku Unit Teknis di lingkungan BSN. Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*.

Tujuan Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian sesuai merupakan turunan dari tujuan Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian adalah sebagai berikut:

TUJUAN

Tujuan	Indikator Tujuan
Terlaksananya tata kelola SPK di organisasi pemerintah	Indeks Penerapan Tata Kelola SPK dengan target sd 2024 sebesar 70%

Sasaran Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mengacu pada sasaran yang tertuang dalam Renstra Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan BSN adalah sebagai berikut:

SASARAN

Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1. Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan SPK dalam memfasilitasi penerapan SNI dan Penilaian Kesesuaian	1. Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholder
2. Meningkatnya produk bertanda SNI yang beredar terhadap persyaratan SNI yang ditetapkan	2. Persentase produk bertanda SNI (yang dimonitor) yang memenuhi persyaratan SNI
3. Meningkatnya jumlah organisasi pemerintah yang menerapkan tata kelola SPK	3. Persentase instansi pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2
4. Meningkatnya kualitas pelayanan SPPT SNI	4. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan SPPT SNI

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022 yang telah selaras dengan IKU di lingkungan BSN terkait Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022
1. Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan SPK dalam memfasilitasi penerapan SNI dan Penilaian Kesesuaian	1. Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholder	86%
2. Meningkatnya jumlah organisasi pemerintah yang menerapkan tata Kelola SPK	2. Persentase instansi pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2	50%
3. Meningkatnya produk bertanda SNI yang beredar terhadap persyaratan SNI yang ditetapkan	3. Persentase produk ber tanda SNI (yang dimonitor) yang memenuhi persyaratan SNI	60%
4. Meningkatnya kualitas pelayanan SPPT SNI	4. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan SPPT SNI	3,3
5. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran	5. Persentase realisasi anggaran Direktorat Sistem Penerapan Standard an Penilaian Kesesuaian	≥ 97%

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melaksanakan 1 (satu) kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:

A. Program Pengembangan Standardisasi Nasional melalui :

1) Kegiatan Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (3561), yang terdiri dari KRO dan RO sebagai berikut:

- a. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan (3561.ABB) dengan Rincian Output (RO) antara lain :
 - 1) Kebijakan Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan (3561.ABB.001)
 - 2) Perundingan Regional Bidang SPK (3561.ABB.002)
 - 3) Implementasi Kesepakatan Internasional (3561.ABB.003)
 - 4) Perundingan Bilateral (3561.ABB.004)
- b. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM (3561.ABK) dengan Rincian Output (RO) :
 - 1) Skema Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (3561.ABK.001)
 - 2) Harmonisasi regulasi berbasis SPK (3561.ABK.002)
 - 3) Pengendalian Penerapan SNI (3561.ABK.003)
- c. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Forum (3561.AEB) dengan Rincian Output (RO) yaitu Sidang Komite TBT WTO (3561.AEB.001)
- d. Klasifikasi Rincian Output (KRO): Pelayanan Publik lainnya (3561.BAH) dengan Rincian Output (RO) antara lain Layanan SPPT SNI (3561.BAH.001)
- e. Klasifikasi Rincian Output (KRO) : Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan (3561.FAI) dengan Rincian Output (RO) : Tata Kelola SPK pada Organisasi Pemerintah (3561.FAI.00)



akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian yang direncanakan dalam Tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel III.1.

Tabel III.1
Pencapaian Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi	% Capaian
1. Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan SPK dalam memfasilitasi penerapan SNI dan Penilaian Kesesuaian	1. Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholder	86%	107%	124%
2. Meningkatnya jumlah organisasi pemerintah yang menerapkan tata Kelola SPK	2. Persentase instansi pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2	50%	53%	106%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi	% Capaian
3. Meningkatnya produk bertanda SNI yang beredar terhadap persyaratan SNI yang ditetapkan	3. Persentase produk bertanda SNI (yang dimonitor) yang memenuhi persyaratan SNI	60%	61,5%	102%
4. Meningkatnya kualitas pelayanan SPPT SNI	4. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan SPPT SNI	3,3	3,63	110%
5. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran	5. Persentase realisasi anggaran Direktorat Sistem Penerapan Standard an Penilaian Kesesuaian	≥ 97%	99,72%	103%

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

SASARAN 1

Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan SPK dalam memfasilitasi penerapan SNI dan Penilaian Kesesuaian

Sasaran satu adalah tersedianya Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan SPK dalam memfasilitasi penerapan SNI dan Penilaian Kesesuaian. Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran ke 1, Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholder. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut melebihi 100 %. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

Tabel III.2
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran I

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	Capaian 2022			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
			Target	Realisasi	% *)	Target	% capaian
1. Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholder	kebijakan	122%	86	107%	124%	95%	100%

Pada Tahun 2022 capaian indikator persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholder, yaitu 124%.

Pada tahun 2022 Direktorat SPSPK telah menetapkan/merumuskan rekomendasi terkait penerapan standar dan penilaian kesesuaian sebanyak 101 rekomendasi. Target capaian yaitu 86% dari rekomendasi ditindaklanjuti stakeholder yaitu sebanyak 86 rekomendasi. Capaian tahun 2022 dari 101 rekomendasi dilakukan tinjauan sebanyak 88 rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh stakeholder, sehingga capaian kinerja sesuai rumusan dibawah ini adalah 107% .

$$\frac{\Sigma \text{Rekomendasi Kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholders}}{\Sigma \text{Rekomendasi Kebijakan penerapan SPK yang disampaikan}} \times 100\%$$

Adapun penjelasan rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang menjadi acuan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Skema Penilaian Kesesuaian

Telah ditetapkan Peraturan Kepala BSN (PBSN) untuk 14 (empat belas) skema penilaian kesesuaian untuk 54 (lima puluh empat) SNI. PBSN Skema Penilaian Kesesuaian ini menjadi acuan Lembaga penilaian kesesuaian untuk melakukan kegiatan penilaian kesesuaian. Adapun 14 Skema Penilaian kesesuaian dapat dilihat pada Tabel III.3

Tabel III.3.1
Daftar PBSN Skema Penilaian Kesesuaian

No.	PBSN	Tentang	Jumlah Skema	Jumlah SNI
1	PBSN 7/2022	Perubahan ketiga atas PBSN 1 Tahun 2019 tentang Skema penilaian kesesuaian terhadap SNI sektor karet dan plastik	1	6
2	PBSN 5/2022	Perubahan Kedua atas PBSN 6/2021 tentang Skema penilaian kesesuaian terhadap SNI sektor elektroteknika, telekomunikasi dan produk optik	7	15
3	PBSN 6/2022	Perubahan atas PBSN 15/2021 tentang Skema penilaian kesesuaian terhadap SNI sektor peralatan permesinan	2	5
4	PBSN 4/2022	Perubahan atas PBSN 4/2022 tentang Skema penilaian kesesuaian terhadap SNI sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	4	28
	JUMLAH		14	54

Dalam hal pengembangan skema yang dilakukan, telah mempertimbangkan prioritas dalam penetapannya, antara lain pengembangan skema penilaian kesesuaian (PK) diutamakan untuk mengakomodir SPPT SNI yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang telah memiliki lingkup akreditasi barang/jasa tertentu, namun belum tersedia

skema PK yang telah ditetapkan BSN. Dalam hal tersebut skema yang telah dikembangkan berdasarkan sumber data dari database bangbeni.bsn.go.id antara lain:



Tabel III.3.2
Daftar PBSN Skema Penilaian Kesesuaian yang dikembangkan untuk mengakomodir lingkup Akreditasi LSPro yang telah mengeluarkan SPPT SNI



No	SNI	Judul SNI
1.	SNI 6128:2015	Beras
2.	SNI 8679-1:2018	Sarana kincir pada budidaya ikan-Bagian 1: Kincir 1 phase
3.	SNI 06-0084-2002	pipa PVC untuk saluran air minum
4.	SNI 06-0162-1987	PVC untuk saluran air buangan di dalam dan di luar bangunan
5.	SNI 4829.2:2015	Sistem perpipaan plastik – Pipa polietina (PE) – Bagian 2: Pipa
6.	SNI ISO 16422:2014	Pipa dan sambungan dibuat dari polivinil klorida non plastisasi terorientasi (PVC-O) untuk mengalirkan air bertekanan – Spesifikasi

Disamping hal tersebut dalam rangka pemastian pemahaman Industri terhadap SNI dan skema yang dikembangkan, maka dilakukan verifikasi lapangan terhadap Industri atau pelaku usaha penerap SNI atau yang potensial menerapkan SNI yang dapat menerapkan skema PK yang dimaksud antara lain:

Tabel III.3.3
Kegiatan verifikasi lapangan dalam pengembangan Skema Penilaian Kesesuaian

No	Kegiatan	Informasi terkait
1.	Verifikasi lapangan Skema CHSE di Nusa Tenggara Timur	Kegiatan verifikasi lapangan kepada pelaku usaha pariwisata yang mendukung penetapan skema SNI CHSE yang sudah ditetapkan pada tahun 2021, melalui launching bersama antara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Standardisasi Nasional tahun 2021.

No	Kegiatan	Informasi terkait
		 <p data-bbox="491 936 1423 1137">Kegiatan verifikasi lapangan pada tahun 2022 dilakukan kepada pelaku usaha sektor pariwisata antara lain (1) Restoran; (2) Destinasi wisata Desa Wisata; (3) Usaha Jasa Perjalanan Wisata; (4) Daya Tarik Wisata; (5) Tempat Pendukung Kegiatan Pariwisata (tempat penjualan cinderamata)</p>  <p data-bbox="491 1738 1423 1854">Kegiatan ini ditujukan untuk menggali pemahaman stakeholder terkait terhadap pemahaman SNI dan skema sertifikasi yang telah ditetapkan.</p>
2.	Verifikasi lapangan skema SNI IndoGAP	Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan dengan diskusi dan kunjungan kepada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang serta kepada kelompok tani yang berpotensi menerapkan SNI terkait IndoGAP Tanaman

No	Kegiatan	Informasi terkait
	Tanaman Pangan	<p>Pangan. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan masukan dalam penyempurnaan skema yang dikembangkan.</p>  <p>Kegiatan ini juga dilakukan dengan melihat kondisi sawah tadah hujan dan irigasi yang menjadi subyek diskusi dan pengecekan lapangan terhadap verifier atau alat penilaian yang dikembangkan.</p> 
3.	Verifikasi lapangan skema SNI pipa plastik	<p>Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan dengan diskusi dan kunjungan kepada industri penerap SNI terkait produk pipa plastik beserta perwakilan dari sekretariat kabinet RI untuk berdiskusi terkait SNI terkait produk pipa plastik dan juga mengetahui titik kritis dari proses produksi dari produk tersebut. Hal tersebut juga dilakukan untuk mendapatkan masukan dalam penyempurnaan skema yang dikembangkan.</p>

No	Kegiatan	Informasi terkait
		
4.	Verifikasi lapangan skema SNI kriteria ekolabel	<p>Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan dengan diskusi dan kunjungan kepada industri penerap SNI terkait produk cat yang memenuhi kriteria ekolabel beserta perwakilan dari sekretariat kabinet RI untuk berdiskusi dan juga mengetahui titik kritis dari proses produksi dari produk tersebut. Hal tersebut juga dilakukan untuk mendapatkan masukan dalam penyempurnaan skema yang dikembangkan. Dalam kesempatan ini juga diperkenalkan kepada perwakilan sekretariat kabinet agar dapat mengetahui urgensi dari pengujian dari LPK IAPMO untuk mendukung daya saing industri nasional dan memenuhi kebutuhan pelaku usaha, serta dapat menunjukkan bahwa dengan kegiatan PK yang dilakukan mampu menunjukkan konsistensi kualitas dari produk yang dihasilkan oleh Industri.</p> 

No	Kegiatan	Informasi terkait
5.	Verifikasi lapangan skema SNI terkait tekstil dan produk tekstil	<p>Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan dengan diskusi dan kunjungan kepada LPK yang mempunyai ruang lingkup akreditasi untuk tekstil dan produk tekstil yaitu Balai Besar Tekstil Bandung serta industri penerap SNI tekstil PT. Trisula Tekstil.</p>  <p>Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan masukan dalam penyempurnaan skema tekstil dan produk tekstil yang dikembangkan. Kunjungan di laboratorium dilakukan untuk memperoleh informasi terkait proses pengujian dan hal-hal yang menjadi perhatian dalam pengendalian pengujian untuk tekstil dan produk tekstil, adapapun kunjungan kepada industri tekstil dilakukan untuk mengetahui titik kritis yang dapat menjadi pertimbangan dan masukan dalam pengembangan skema PK tekstil dan produk tekstil</p> 

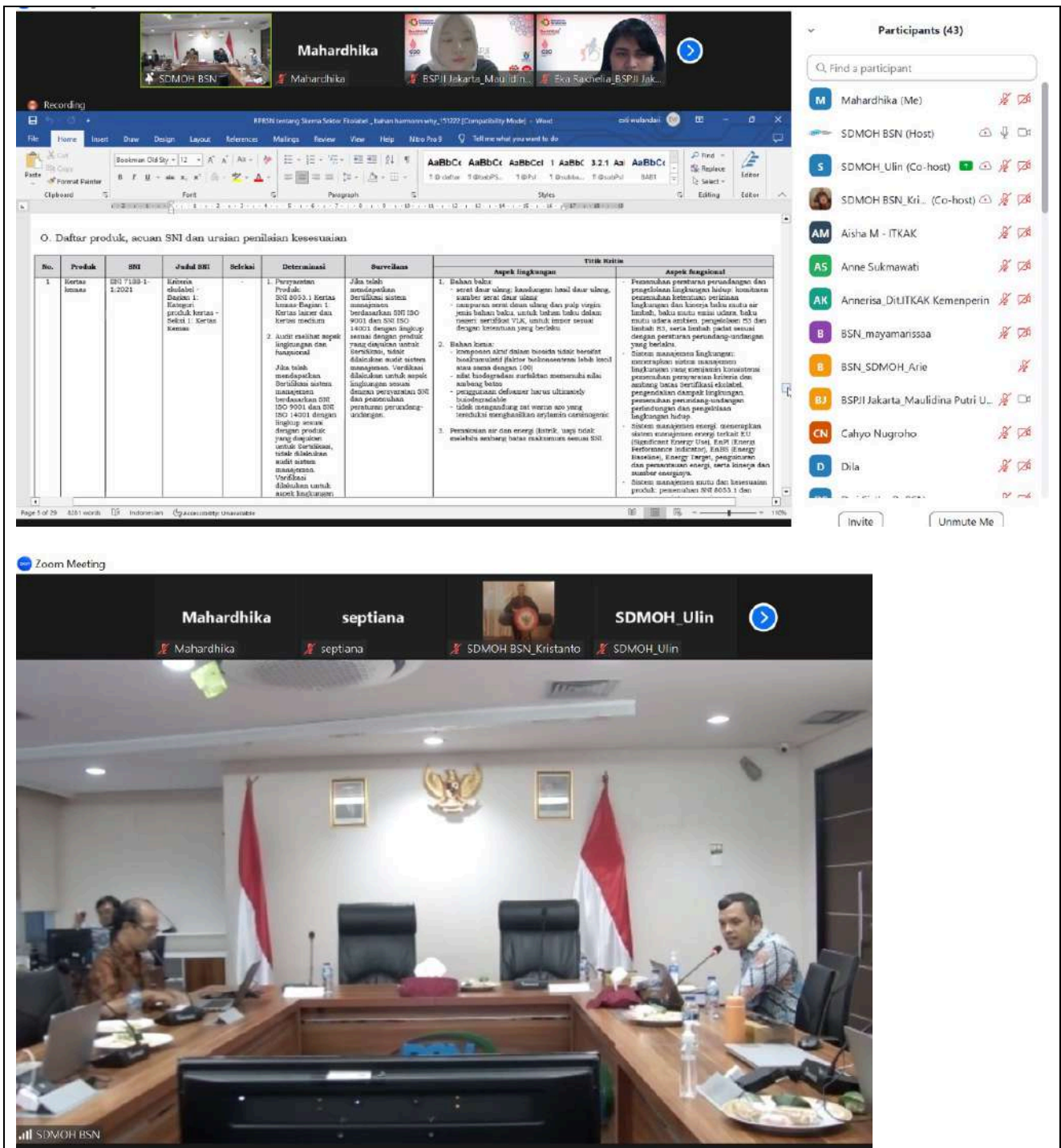
Saat ini terdapat beberapa Skema yang telah dilaksanakan Rapat Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Sekretaris Kabinet pada bulan Desember 2022, yang menunggu proses Pengundangan dari Kementerian Hukum dan HAM. Proses Rapat Harmonisasi dan Skema yang sedang dalam proses Pengundangan sebagai berikut:

Tabel III.3.4
Daftar Rancangan PBSN Skema Penilaian Kesesuaian yang sedang dalam Proses Pengundangan

No.	Rancangan PBSN	Jumlah Skema	Jumlah SNI
1	Rancangan PBSN tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan	1	20
2	Rancangan PBSN tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Tekstil	6	80
3	Rancangan PBSN tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa	1	5
4	Rancangan PBSN tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Ekolabel	1	13
	JUMLAH	9	118

Rapat Harmonisasi Rancangan PBSN pada bulan Desember 2022





2. Kebijakan penunjukkan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

Telah ditetapkan kebijakan penunjukkan LPK, yaitu sebanyak 15 (lima belas) Surat Keputusan Kepala BSN tentang Penunjukkan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro). Kebijakan ini menjadi dasar bagi Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) untuk melakukan sertifikasi SNI, bagi SNI yang belum tersedia LSPro yang diakreditasi KAN. Lembaga sertifikasi produk yang ditunjuk ini kemudian harus dapat diakreditasi oleh KAN dalam waktu 2 tahun. Berikut daftar SK Kepala BSN untuk Penunjukkan LS Pro pada Tabel III.4

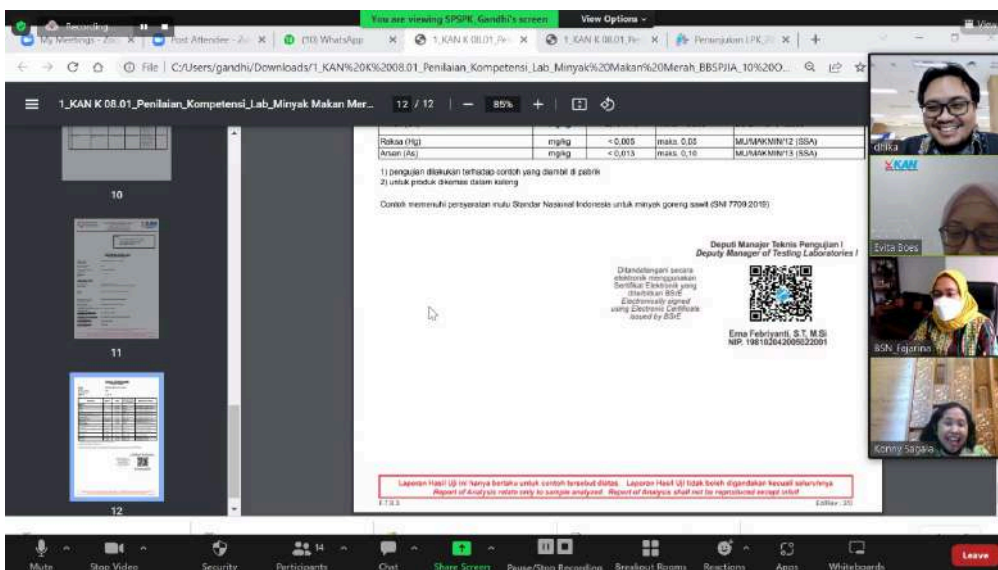
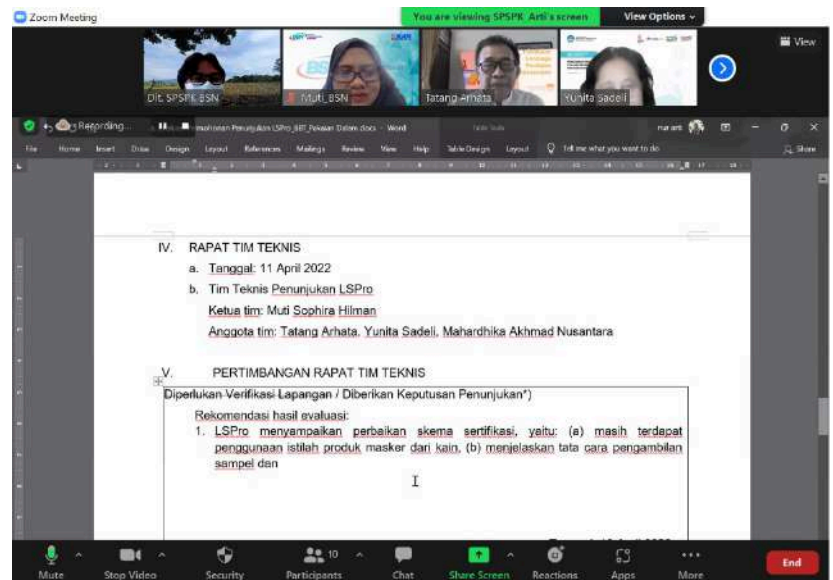
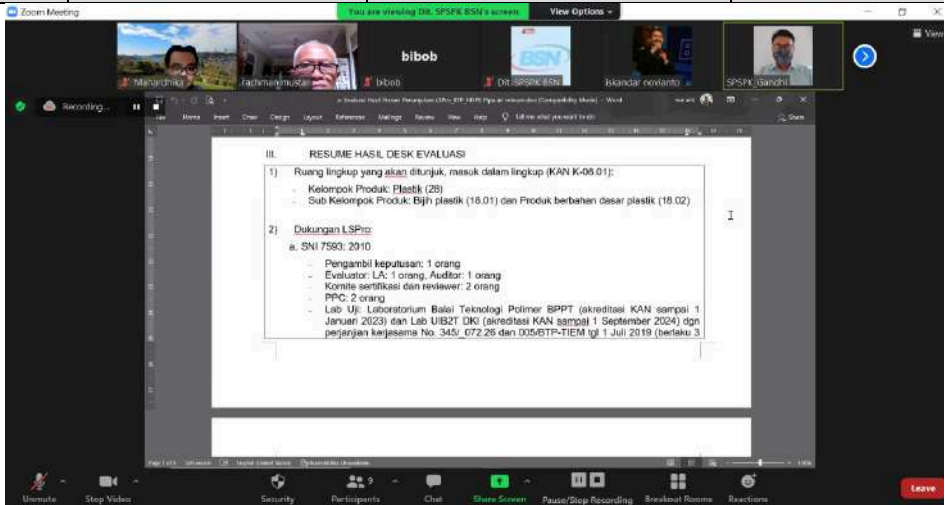
Tabel III.4
Daftar SK Kepala BSN Tentang Penunjukkan LPK

No.	LSPro	Ruang Lingkup	SK Ka. BSN (Penunjukkan LSPro)	Masa berlaku (2 tahun)	Keterangan
1.	LSPro Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "Lemigas" (LSPr-077-IDN)	SNI 8203:2017, <i>Standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar gas jenis Liquefied Petroleum Gas (LPG) khusus rumah tangga, komersial, dan industri</i>	SK No. 3/KEP/BSN/1/2022 tgl 19 Januari 2022	s/d 18 Januari 2024	
2.	LSPro Unit Pelaksana Teknis Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (UPT PMP2KP) Surabaya (LSPr-056-IDN)	SNI 8646:2018, <i>Kerupuk ikan, udang dan moluska siap makan</i>	SK No. 43/KEP/BSN/3/2022 tgl 7 Maret 2022	s/d 6 Maret 2024	
3.	LSPro PT IAPMO Group Indonesia (LSPr-054-IDN)	SNI 8986:2021, <i>Baja karbon batangan canai panas untuk structural mesin</i>	SK No. 44/KEP/BSN/3/2022 tgl 7 Maret 2022	s/d 6 Maret 2024	Ruang lingkup telah diakreditasi KAN (28 November 2022)
4.	LSPro Balai Besar Standardisasi Pelayanan Jasa Industri Tekstil, Kementerian Perindustrian (LSPr- 023-IDN)	SNI 8361:2017, <i>Pakaian dalam wanita</i>	SK No. 132/KEP/BSN/5/2022 tgl 30 Mei 2022	s/d 29 Mei 2024	
5.	LSPro Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian (Alsintan) (LSPr- 027-IDN)	SNI 8030:2014, <i>Mesin pamarut multi komoditas hasil pertanian – Syarat mutu dan metode uji – Tipe rol</i> SNI 8031:2019, <i>Mini Tiller – Mesin pengolahan tanah sekunder – Syarat mutu dan metode uji</i> SNI 8886:2020, <i>Mesin pengering mobile tipe sirkulasi untuk padi, jagung, kedelai – Syarat mutu dan metode uji</i>	SK No. 193/KEP/BSN/7/2022 tgl 4 Juli 2022	s/d 3 Juli 2024	

No.	LSPro	Ruang Lingkup	SK Ka. BSN (Penunjukkan LSPro)	Masa berlaku (2 tahun)	Keterangan
6.	LSPro Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Jakarta, Kementerian Perindustrian (LSPr- 004-IDN)	SNI 03-3046-1992, Kawat bronjong dan bronjong berlapis PVC (Polivinil Chlorida)	SK No. 245/KEP/BSN/8 /2022 tgl 5 Agustus 2022	s/d 4 Agustus 2024	
7.	LSPro PT Multicert Global Indonesia (LSPr-072-IDN)	SNI 8896:2020, Keju mozarella	SK No. 253/KEP/BSN/8 /2022 tgl 11 Agustus 2022	s/d 10 Agustus 2024	
8.	LSPro Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro – Kementerian Perindustrian (LSPr-010-IDN)	SNI 01-3709-1995, Rempah-rempah bubuk	SK No. 251/KEP/BSN/8 /2022 tgl 11 Agustus 2022	s/d 10 Agustus 2024	
9.	LSPro Balai Besar Standardisasi Pelayanan Jasa Industri Tekstil, Kementerian Perindustrian (LSPr- 023-IDN)	SNI 6688:2011, Tekstil – Kain rajut untuk pakaian olahraga	SK No. 252/KEP/BSN/8 /2022 tgl 11 Agustus 2022	s/d 10 Agustus 2024	
10.	LSPro PT IAPMO Group Indonesia (LSPr-054-IDN)	SNI 07-1579-1989, Baja karbon dan baja panduan Batangan untuk pengerjaan dingin	SK No. 240A/KEP/BSN /8/2022 tgl 2 Agustus 2022	s/d 1 Agustus 2024	Ruang lingkup telah diakreditasi KAN (28 November 2022)
11.	LSPro Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim, Kementerian Perindustrian (LSPr-018-IDN)	SNI 3729:2008, Tepung sagu	SK No. 273/KEP/BSN/8 /2022 tgl 24 Agustus 2022	s/d 23 Agustus 2024	

No.	LSPro	Ruang Lingkup	SK Ka. BSN (Penunjukkan LSPro)	Masa berlaku (2 tahun)	Keterangan
12.	LSPro PT Sucofindo ICS (LSPr-022-IDN)	SNI 8863:2019, <i>Spesifikasi asbuton butir B 5/20 untuk perkerasan jalan</i> SNI 8864:2019, <i>Spesifikasi asbuton butir B 50/30 untuk kekerasan jalan</i> SNI 8865:2019, <i>Spesifikasi asbuton pracampur untuk perkerasan jalan</i> SNI 8866:2019, <i>Spesifikasi asbuton olahan kadar bitumen tinggi untuk perkerasan jalan</i> SNI 8867:2019, <i>Spesifikasi asbuton campuran panas hampar dingin</i>	SK No. 282/KEP/BSN/9 /2022 tgl 2 September 2022	s/d 1 Septemb er 2024	
13.	LSPro Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Jakarta, Kementerian Perindustrian (LSPr- 004-IDN)	SNI 04-2763-1992, <i>Lampu pengatur lalu lintas</i>	SK No. 283/KEP/BSN/9 /2022 tgl 2 September 2022	s/d 1 Septemb er 2024	
14.	LSPro PT Intertek Utama Service (LSPr- 052-IDN)	SNI 8361:2022, <i>Pakaian dalam wanita</i>	SK No. 363/KEP/BSN/1 0/2022 tgl 3 Oktober 2022	s/d 2 Oktober 2024	
15	LSPro Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro – Kementerian Perindustrian (LSPr-010-IDN)	SNI 9098:2022, <i>Minyak makan merah</i>	SK No. 437/KEP/BSN/1 1/2022 tgl 7 November 2022	s/d 6 Novemb er 2024	
Rapat Penunjukan LSPro selama Tahun 2022					

No.	LSPro	Ruang Lingkup	SK Ka. BSN (Penunjukkan LSPro)	Masa berlaku (2 tahun)	Keterangan
-----	-------	---------------	--------------------------------	------------------------	------------



Berikut adalah Lembaga Sertifikasi Produk yang telah ditunjuk namun tidak dapat menproses akreditasi dalam jangka waktu dua tahun sehingga Penunjukkan LS Pro tersebut harus di cabut.

Tabel III.5
Daftar SK Kepala BSN Tentang Pencabutan LPK

No	LSPro	Lingkup	Kepka Pencabutan
1	LSPro PT Multicert Global Indonesia (LSPr-072-IDN)	SNI ISO 13500:2017, <i>Industri minyak dan gas bumi – Material lumpur pemboran – Spesifikasi dan pengujian</i>	SK No. 197/KEP/BSN/7/2022 tgl 5 Juli 2022
2	LSPro PT IAPMO Group Indonesia (LSPr-054-IDN)	SNI 19-4059-1996, <i>Kantong plastik untuk pembibitan tanaman</i>	SK No. 383A/KEP/BSN/10/2022 tgl 11 Oktober 2022 Ruang lingkup telah diakreditasi KAN (28 November 2022)
3	LSPro PT Intertek Utama Service (LSPr- 052-IDN)	SNI 8914:2020, <i>Tekstil – Masker dari kain</i>	SK No. 529A/KEP/BSN/12/2022 tgl 1 Desember 2022

3. Rekomendasi hasil kajian pengendalian standar

Kegiatan pengendalian Penerapan standar yang dilaksanakan melalui program monitoring dan uji petik menghasilkan beberapa rekomendasi yang telah disampaikan ke stakeholder terkait. Adapun rekomendasi tersebut sebagai berikut:

- a. Merekomendasikan ke unit yang relevan di BSN untuk meningkatkan pembinaan bagi pelaku usaha dalam menerapkan SNI untuk produk kerupuk udang, saus cabe, agar-agar tepung, madu, lampu LED swa balast, pupuk dolomit, dan handuk.
- b. Merekomendasikan ke KAN untuk meningkatkan kinerja LSPro yg sudah diakreditasi, termasuk tindakan lain yg diperlukan untuk meningkatkan pemenuhan produk kerupuk udang, saus cabe, agar-agar tepung, madu, lampu LED swa balast, pupuk dolomit, dan handuk terhadap SNI.
- c. Meminta klarifikasi ke pelaku usaha terkait kesulitan dalam pemenuhan persyaratan SNI kerupuk udang, saus cabe, agar-agar tepung, madu, lampu LED swa balast, pupuk dolomit, dan handuk.
- d. Meminta kepada unit terkait BSN untuk dapat melakukan kaji ulang SNI dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan yg dihadapi oleh pelaku usaha untuk produk kerupuk udang, saus cabe, agar-agar tepung, madu, lampu LED swa balast, pupuk dolomit, dan handuk.

- e. Pemberian apresiasi kepada penerap SNI yang produknya memenuhi SNI melalui surat dan promosi produk kerupuk udang, saus cabe, agar-agar tepung, minyak goreng kelapa, madu, lampu LED swa balast, pupuk dolomit, dan handuk.

4. Rekomendasi hasil kajian penerapan regulasi teknis berbasis SNI dan notifikasi regulasi di TBT WTO, serta specific trade concern Indonesia dan negara anggota WTO yang ditindaklanjuti oleh stakeholder.

Kebijakan terkait dengan penanganan hambatan teknis perdagangan untuk meningkatkan akses pasar pelaku usaha melalui pemenuhan terhadap regulasi teknis, standar dan penilaian kesesuaian mencakup pelaksanaan notifikasi rancangan dan regulasi teknis, analisis tanggapan dan pengajuan enquiry, serta pengajuan *specific trade concern* dalam forum TBT WTO. Pada tahun 2022 capaian terkait dengan kebijakan ini sebanyak 199 rekomendasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III.6
Jumlah Kebijakan Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan

Kebijakan	Jumlah
Notifikasi regulasi teknis	16
Analisis tanggapan dan pengajuan enquiry	62
Pengajuan <i>Specific Trade Concern</i>	5
Pemberian tanggapan <i>Specific Trade Concern</i>	5

Notifikasi pada tahun 2022 sebanyak 16 notifikasi, terdiri dari 12 notifikasi regular dan 4 notifikasi addendum. Tanggapan dan pemantauan yang dilakukan terhadap rancangan regulasi Anggota WTO dan sebaliknya adalah sebanyak 62 tanggapan.



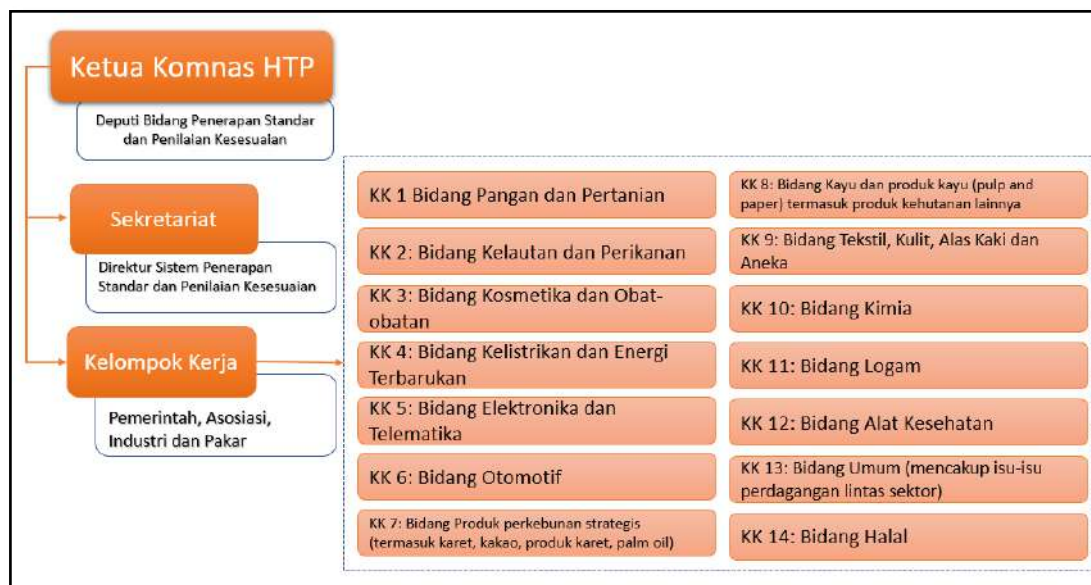
Gambar III.1 Jumlah Notifikasi Indonesia Periode 2012-2022

Tahapan penanganan hambatan teknis dilakukan melalui analisis monitoring regulasi yang dilakukan terhadap kebijakan yang berpotensi menghambat perdagangan dari analisis regulasi, standar dan penilaian kesesuaian serta nilai ekspor yang dilakukan setiap hari dan diinformasikan secara mingguan, selanjutnya dibahas dalam kelompok kerja dan diajukan dalam komnas untuk ditetapkan posisi Indonesia dan disampaikan baik ke enquiry point Anggota WTO, pertemuan bilateral dan sidang regulasi TBT WTO yang diselenggarakan 3 kali dalam setahun.



Gambar III.2 Tahapan Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan dalam Komite Nasional Hambatan Teknis Perdagangan

Komite nasional penanganan hambatan teknis perdagangan yang terdiri dari berbagai K/L dan stakeholder lainnya yang terkait. Untuk membahas isu hambatan teknis perdagangan terdapat 14 Kelompok Kerja sebagaimana digambarkan dalam struktur berikut.



Gambar III.3 Struktur Komnas dan Kelompok Kerja Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan

Pada tahun 2022 Indonesia mengajukan STC dalam sidang TBT WTO yang dilakukan 3 kali yaitu pada:

Tabel III.7
Rangkaian Pertemuan Sidang TBT WTO Tahun 2022

Tanggal	Kegiatan
10 Februari	Informal meeting
8 Maret	Thematic Session on Accreditation
9-11 Maret	Pertemuan Reguler
27 April	Informal meeting
29 Juni	Informal meeting
12 Juli	Thematic Session on Regulatory Cooperation between Members (MSMEs) and Transparency
13-15 Juli	Pertemuan Reguler
13 Oktober	Informal meeting
15 November	Thematic Session on GRP and Standard Development in Codex
16-18 November	Pertemuan Reguler

Dalam seluruh pertemuan Thematic Session yang diselenggarakan sebelum Sidang Komite TBT, BSN ataupun K/L telah berpartisipasi mengirimkan perwakilan sebagai narasumber (pembicara) terkait dengan topik yang dibahas.

Tabel III.8
Narasumber Indonesia dalam Pertemuan Thematic Session Sidang TBT WTO

Judul Thematic Session	Judul Presentasi	Pembicara
<i>Thematic Session on Accreditation</i>	Indonesia Accreditation Policy in Supporting The Acceptance of Export Product	Sugeng Raharjo (Direktur Sistem dan Harmonisasi Akreditasi)
<i>Thematic Session on Regulatory Cooperation between Members (MSMEs) and Transparency</i>	Indonesia's Experience on Promoting Standard Implementation to the MSMEs	Dr. Zakiyah (Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian)
<i>Thematic Session on GRP</i>	Implementation Of GRP In Formulating Food Safety Regulations In Indonesia	Anisyah (Direktur Standardisasi dan Pangan Olahan, BPOM)

Pembahasan informal meeting yang dilakukan bersama Sekretariat WTO dan Anggota, membahas mengenai Proposal Prosedur Penilaian Kesesuaian sebagai dasar dalam penentuan metode penilaian kesesuaian. Indonesia menyampaikan masukan melalui JOB/TBT/439 tanggal 8 Februari 2022 tentang masukan mengenai prinsip *risk*

assessment dan penggunaan prosedur penilaian kesesuaian berbasis standar internasional seperti ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17050, ISO/IEC 17067 dalam melakukan determinasi penilaian resiko. Selain itu Indonesia juga mengusulkan untuk menggunakan MRA di bawah skema ILAC dan IAF untuk memfasilitasi keberterimaan hasil penilaian kesesuaian.

Dokumen Proposal Penilaian Kesesuaian dilanjutkan ISO/IEpembahasannya menjadi dokumen *Element Paper: Draft Elements for the Non-Prescriptive Practical Guidelines to Support Regulators in the Choice and Design of Appropriate and Proportionate Conformity Assessment Procedures* (JOB/TBT/438). Dokumen tersebut berisi tentang pertimbangan umum, prinsip prosedur penilaian kesesuaian, dan jenis (tipe) penilaian kesesuaian. Indonesia memberikan tanggapan terkait draft Element Paper melalui dokumen JOB/TBT/460 tanggal tanggal 13 Mei 2022, yang mengusulkan untuk memasukkan aspek Market Surveillance yang ditentukan oleh Pemerintah dalam menentukan prosedur penilaian kesesuaian serta perlunya justifikasi atau petunjuk lanjutan bagi UMKM dalam memenuhi persyaratan penilaian kesesuaian.

Dalam pertemuan Sidang Reguler Komite TBT tahun 2022, dibahas mengenai kebijakan yang menghambat perdagangan Indonesia seperti pemberlakuan Indian Standard dan sertifikasi produk kertas fotokopi Indonesia ke India, hambatan ekspor ban, hambatan pendaftaran produk pangan olahan Indonesia ke China, penurunan batas residue pestisida Uni Eropa serta hambatan ekspor produk oleokimia ke India. Lebih lanjut, Indonesia menerima STC terkait dengan kebijakan halal, PP 28/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, kuota impor, penilaian kesesuaian produk AC serta rancangan peraturan SKEM pada produk elektronik. Lebih lanjut, STC yang dibahas dapat dilihat pada daftar berikut:

Tabel III.9
STC yang diajukan oleh Indonesia dalam Sidang TBT WTO

NO	Negara / STC Ofensif
1	India - <i>Plain Copier Paper (Quality Order) 2020 (G/TBT/N/IND/140)</i>
2	India - <i>Pneumatic tyres and tubes for automotive vehicles</i>
3	China - <i>General Administration of China Custom (GACC) Decree 24</i>
4	EU - <i>Draft Commission Regulation amending Annexes II and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for clothianidin and thiamethoxam in or on certain products (G/TBT/N/EU/908)</i>
5	India - <i>Quality Control Orders for Chemical and Petrochemical Substances</i>

Pelaku usaha *Plain Copier Paper* Indonesia menyampaikan telah mendapatkan Bureau of Indian Standards (BIS) *license* sebagai persyaratan ekspor sehingga saat ini sudah tidak terdapat hambatan ekspor produk kertas foto kopi.

Tabel III.10
STC yang diajukan kepada Indonesia dalam Sidang TBT WTO

NO	STC Defensif
1	<i>Halal Product Assurance Law No. 33 of 2014 and its implementing regulations</i>
2	<i>Government Regulation 28 of 2021 – Implementing Regulation (for the Manufacturing/Industry Sector) to Law No. 11 of 2020 the "Job Creation Act"</i>
3	<i>Import quota and SNI certification requirements</i>
4	<i>Remote factory audit for air conditioners</i>
5	<i>Draft decree regarding Minimum Energy Performance (SKEM) and Energy Saving Label for various products</i>

Dalam rangkaian pertemuan Sidang TBT WTO, dilaksanakan pula Pertemuan bilateral untuk membahas perkembangan isu terkait STC yang diajukan Indonesia dan sebaliknya, yakni :

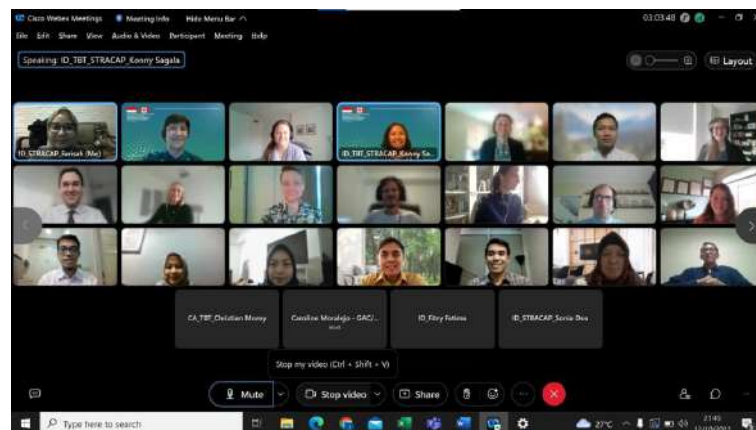
Tabel III.11
Pertemuan Bilateral Indonesia dalam Sidang TBT WTO

Negara	Isu yang dibahas
Amerika Serikat	Perkembangan regulasi halal Indonesia dan peraturan turunan PP 28/2021
Uni Eropa	Perkembangan regulasi halal Indonesia dan peraturan turunan PP 28/2021
India	Perkembangan isu hambatan ekspor kertas fotokopi, produk ban serta produk oleokimia Indonesia
Thailand	Perkembangan kebijakan sertifikasi SNI produk AC Indonesia

Selain pertemuan bilateral, Indonesia mengadakan kegiatan *Webinar Session on the Implementation of Halal Assurance System in Indonesia* pada tanggal 7 Maret 2022 dengan seluruh Enquiry Point Anggota WTO. Pertemuan yang dibuka oleh Deputi PSPK BSN tersebut membahas mengenai daftar *enquiry* atau pertanyaan yang disampaikan kepada Indonesia terkait dengan notifikasi regulasi halal dan adendumnya yakni G/TBT/N/IDN/131, G/TBT/N/IDN/134, G/TBT/N/IDN/138, G/TBT/N/IDN/139 dan G/TBT/N/IDN/140. Pertemuan yang dihadiri oleh 132 peserta melalui zoom tersebut secara daring, menyampaikan mengenai respon Indonesia terhadap pertanyaan yang diajukan seputar notifikasi halal BPJPH.

5. Rekomendasi di bidang STRACAP dari proses berdasarkan perundingan atau kesepakatan internasional yang untuk ditindaklanjuti oleh stakeholder

Perundingan perdagangan internasional selama Tahun 2022 telah dilakukan melalui partisipasi aktif dalam forum bilateral, regional dan multilateral. Perundingan yang dilakukan merupakan satu kesatuan perjanjian yang komprehensif di berbagai bidang yang membentuk satu *Trade Agreement (TA)* dimana isu SPK menjadi salah satu *Chapter/Article* dalam TA tersebut dan BSN bertindak sebagai *lead negotiator*nya. Rangkaian perundingan dilakukan baik di forum bilateral (IEUCEPA, IUAECEPA, IETO TETO Taiwan), regional (ACCSQ dan beberapa perundingan ASEAN+1 FTA), dan multilateral (*Trade Policy Reviews WTO* dan Implementasi *The Trade Facilitation Agreement WTO*).



Gambar III.7 Sidang IEU-CEPA ke-12 (hybrid)



Gambar III.8 Sidang I-UAE CEPA ke-2 (hybrid)

Isu utama bidang SPK yang dinegosiasikan meliputi standar, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian, dan isu pendukung lain yang dipandang penting seperti transparansi, kerjasama, konsultasi/penyelesaian sengketa, *contact point*, dan isu lain berdasarkan kesepakatan bersama. Berkebnnaan dengan perundingan bilateral, rekomendasi posisi Indonesia yang telah disampaikan pada beberapa forum, yaitu:

- Perundingan Indonesia Canada CEPA WG STRACAP
- Perundingan Indonesia UEA CEPA WG STRACAP
- Perundingan Indonesia EU CEPA WG TBT



Selain tersebut diatas, Indonesia sebagai bagian dari ASEAN juga telah menyelesaikan posisi Indonesia pada perundingan dengan negara mitra dan sekarang dalam tahap implementasi baik di forum bilateral (Indonesia-Australia/IACEPA), regional (ASEAN-Canada/ACAFTA ASEAN-China/ACFTA, ASEAN-Australia New Zealand/AANZFTA, *Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP*). Pemanfaatan perundingan di bidang SPK tersebut telah dilakukan melalui perumusan program kerja bersama dengan K/L dengan mempertimbangkan kondisi dan ketersediaan infrastruktur mutu yang ada agar program kerja yang diusulkan tepat guna dan tepat sasaran.

Implementasi IACEPA dilakukan melalui koordinasi dengan BAPPENAS yang merupakan institusi yang bertanggung jawab di bidang *cooperation* yang meliputi bidang *Agrifood, Advanced Manufacturing* dan *Services* yang secara umum hasil dari kerjasama tersebut adalah pembukaan akses pasar yang lebih luas (*greater market access*), pasar yang terintegrasi lebih baik (*better integrated markets*) dan penguatan keterampilan (*enhanced skills*). Khusus terkait SPK, BSN secara intens terlibat dalam *penyusunan Annual Work Plan Economic Cooperation Program IA – CEPA* yang dikoordinasikan dengan Direktorat Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional – BAPPENAS. Bersamaan dengan BSN saat ini mengusulkan program di Bidang STRACAP sebagai bagian dari *Annual Work Plan Economic Cooperation Program IA – CEPA*, yaitu:

1. *Empowering Local Stakeholders in Maximizing the Benefit of the Implementation IA CEPA*
2. *Standards Harmonization Indonesia and Australia in Enegy Sectors*

Implementasi perundingan juga dilakukan BSN melalui Direktorat SPSPK juga berperan aktif dalam kegiatan implementasi Indonesia EFTA CEPA melalui Working Group kerja sama ekonomi dan pembangunan kapasitas (ECCB) yang dikoordinasikan oleh Direktorat Kerja Sama Intra dan Antar kawasan Amerika dan Eropa. Rekomendasi/Proposal BSN telah diterima dalam Program Quick-Win ECCB I-EFTA CEPA untuk dilaksanakan Tahun 2023 sebagaimana disampaikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel III.12
Proposal yang diterima dalam ECCB IEFTA CEPA

No	Tema	Tahun	SDGs Terkait
1.	Technical Assistant for Biology Reference Material Production	2023	 
2.	Strengthening Indonesia's SDGs Through National Platform on Voluntary Sustainability Standard	2023 - 2025	

Implementasi ACFTA dan AANZFTA dikoordinasikan oleh BSN dengan institusi teknis (BPOM, KEMENPERIN, KEMDAG, KOMINFO, KEMTAN). Khusus untuk ACFTA bidang yang disepakati meliputi *Healthcare (Cosmetics, Traditional Medicines, Health Supplements), Prepared Foodstuff, Electrical and Electronic Equipment, Wood-based, dan Automotives*. Selanjutnya, untuk AAZFTA bidang yang disepakati meliputi *Good Regulatory Practices (GRP), International Standard Engagement dan Technical Capacity Building* di bidang *Food and Beverages, Cosmetics dan Health Supplement*.

Disamping itu, sebagai tahap persiapan dalam keketuaan ASEAN 2023, BSN telah mengajukan Priority Economic Deliverable (PED) yang mengambil topik spesifik pada isu SDGs. PED yang mengambil judul *Roadmap of ASEAN Harmonised Standards to Support SDG* ini akan memberikan rekomendasi bagi ACCSQ member dalam mengharmonisasi standar yang memiliki parameter teknis yang mendukung implementasi SDGs. Dalam pengembangannya, BSN telah melakukan konsultasi dengan lintas kementerian (KEMLU, KEMENKO Perekonomian, KEMDAG) dan ASEAN secretariat untuk mengusulkan *Concept Note* PED tersebut dan menargetkan penyelesaiannya pada September 2023. Diharapkan dengan penyelesaian PED ini, produk ASEAN khususnya Indonesia dapat berdaya saing dengan menambah keunggulan pada aspek sustainability yang menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan aspek kesehatan dan keamanan bagi konsumen.

Sementara itu, peran aktif BSN dalam *Trade Policy Review* - WTO dilakukan dengan melakukan analisis dan tinjauan terhadap kebijakan bidang SPK yang diterapkan oleh anggota WTO guna melihat apakah kebijakan tersebut sejalan dengan aturan WTO dan tidak menciptakan hambatan teknis perdagangan (TBT). Program TPR Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel III.13 Program TPR Tahun 2022

No	Negara	Tanggal Diskuasi TPR
1	Ghana	21 and 23 June 2022
2	New Zealand	1 and 3 June 2022
3	Switzerland, Liechtenstein,	18 and 20 May 2022
4	Pakistan	30 March and 1 April 2022
5	United Arab Emirates	22 and 24 March 2022
6	Guyana	2 and 4 March 2022
7	Panama	24 and 26 January 2022
8	Georgia	12 and 14 January 2022
9	United States	14 and 16 December 2022
10	Seychelles	5 and 7 December 2022
11	Brazil	23 and 25 November 2022
12	Barbados	25 and 27 October 2022
13	Djibouti	12 and 14 October 2022
14	Mexico	5 and 7 October 2022
15	Moldova, Republic of	20 and 22 July 2022

Implementasi WTO TFA di tahun 2021 fokus pada perumusan mekanisme kesekretariat Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan) yang merupakan salah satu syarat implementasi TFA serta penunjukan *focal point* pada K/L terkait. Bersamaan dengan itu sepanjang Tahun 2021 BSN secara aktif terlibat dalam beberapa diskusi sekaligus mengikuti perkembangan Voluntary Sustainable Standar (VSS) Bersama UNFSS. Berdasarkan evaluasi kegiatan yang dilakukan, Sebagian besar permasalahan yang timbul dikarenakan adanya kesenjangan (*gap/level of playing field*) dalam infrastruktur mutu yang ada yang diharapkan dapat terjembatani melalui kesepakatan perundingan ini.

6. Rekomendasi Kelompok Kerja Pengelolaan Penilaian Kesesuaian (KKPPK)

KKPPK telah memberikan 4 tanggapan pada sekretariat IECEE pada tahun 2022. Tanggapan pertama berupa usulan untuk mengurangi biaya iuran IECEE tahun 2023 untuk Member Body dari CHF 2.400.00 menjadi CHF 2.000.00 dikarenakan pemerintah Indonesia memfokuskan penggunaan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 dan vaksinasi.

Tanggapan kedua terkait IECEE-CMC/2401/DV mengenai Global Impact Fund. Global Impact Fund (GIF) merupakan usulan rencana strategis IEC untuk mendukung pelaksanaan kerja IEC untuk mengatasi tantangan global. Sesuai dengan Operational Rules yang telah disetujui, UKM akan diberikan hibah untuk mengatasi tantangan masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG) seperti limbah elektronik, akses energi, efisiensi energi atau perubahan iklim dengan menerapkan Standar Internasional IEC dan/atau Sistem Penilaian Kesesuaian IEC di Negara tertentu. Untuk melaksanakan komitmen tersebut, IEC Board memutuskan untuk meluncurkan IEC Global Impact Fund melalui donasi tahunan sebesar 1% dari Modal & Cadangan IEC selama tiga tahun fase percontohan. Jumlah tersebut akan dipindahkan ke cadangan khusus dan akan tercermin dalam akun 2022. Pada prinsipnya, kontribusi 1% juga akan diterapkan pada tahun 2023 dan 2024. Perlu dicatat bahwa IEC Board menyetujui alokasi untuk seluruh IEC, termasuk Sistem CA IEC, yang akan didiskusikan dalam Komite Manajemen masing-masing. Oleh karena itu, keputusan IEC Board untuk meluncurkan GIF memberikan kontribusi dari sistem IEC CA termasuk IECEE dari 1% dari Modal & Cadangan per tahun selama tiga tahun (2022-2024), dengan IECEE CMC direkomendasikan untuk mendukung hal ini. Hasil tanggapan menyetujui dokumen IECEE-CMC/2401/DV. Rekomendasi ini dibuat dengan pertimbangan bahwa Global Impact Fund diharapkan mempunyai manfaat bagi IECEE untuk memperkuat visibilitas IECEE, membantu IECEE dikenal di wilayah baru, dan membangun hubungan baru dan berpotensi menjalin kemitraan strategis baru. Namun, Sekretariat IECEE harus mengirimkan laporan penggunaan dana tersebut kepada semua Member Body dan menyusun suatu dokumen yang menyatakan kriteria small medium enterprises yang mendapatkan funding.

Tanggapan ketiga adalah penyampaian dukungan atas pembuatan TF (Task Force) "SMART" sesuai dokumen IECEE-CMC/2408/DV. "SMART" adalah program bersama antara International Electrotechnical Commission (IEC) dan ISO, "SMART" mengacu pada format, proses, dan alat yang diperlukan bagi pengguna (human and technology-based) untuk berinteraksi dengan standar. Solusi digital ini melayani kebutuhan semua pemangku kepentingan, mulai dari industri, regulator, dan pengguna akhir hingga masyarakat secara keseluruhan. Untuk mendukung kerja SMART CA (conformity assessment) Group, sekretariat IECEE meminta persetujuan Member Bodies IECEE untuk menyetujui pembuatan TF "SMART". Hasil tanggapan menyetujui pembuatan TF (Task Force) "SMART" guna mengikuti dan mengevaluasi kerja JCG (Joint Coordination Group antara IEC SMART TF dan ISO SMART-SG) dalam kaitannya dengan SMART Standards dan CA, dan mengembangkan pandangan IECEE tentang aktivitas SMART yang sedang berlangsung.

Tanggapan keempat, Terkait informasi dari sekretariat IECEE mengenai adanya perubahan sistem penagihan. Agar transfer tagihan dapat berjalan dengan lancar dan agar sistem baru IECEE selalu terbaru. IECEE meminta konfirmasi kepada MB, kepada siapa

faktur luran Tahunan harus ditujukan. Sebagai catatan bahwa untuk invoice dalam bentuk (.pdf) dan terdapat satu nama yang dapat muncul di invoice. Namun IECEE akan dapat mengirim email dengan faktur ke orang yang berbeda. Tanggapan dilakukan dengan penyampaian informasi kepada Sekretariat IECEE untuk nama pada invoice adalah Bapak Zul Amri dari Biro Hubungan Masyarakat, Kerjasama dan Layanan Informasi BSN, dan tagihan dapat ditujukan ke email kerj_int@bsn.go.id dan zul@bsn.go.id. (cc) cbscheme@bsn.go.id, sekre.dir.spspk@bsn.go.id, aries@bsn.go.id, serta deni.darmawan@bsn.go.id. Hal tersebut sebagai antisipasi dan update sistem penagihan terbaru dari IECEE yang perlu disampaikan oleh seluruh member body.

7. Rekomendasi Komite Kebijakan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (KKPrS)

Sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian diperlukan sebagai acuan stakeholder dalam melaksanakan penerapan standar sesuai dengan peranannya agar dapat mencapai tujuan standar, yaitu sebagai referensi pasar dalam melindungi kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta dalam memfasilitasi perdagangan khususnya meningkatkan daya saing produk nasional. Forum penerapan standar dan penilaian kesesuaian menjadi hal penting untuk dijadikan program dalam sistem penerapan standar guna membahas hal-hal terkait penelaahan serta isu strategis mengenai penerapan standar secara nasional maupun internasional.

Untuk itu, dilaksanakanlah rapat koordinasi pembahasan terkait penerapan standar dan penilaian kesesuaian oleh Komite Kebijakan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian yang disebut dengan KKPrS bersama K/L serta asosiasi terkait. Rapat pembahasan diprogramkan sebanyak 4 (empat) kali, 1 (satu) kali dilakukan untuk penyusunan program selama 1 tahun kedepan dan 3 (tiga) kali dilakukan untuk pembahasan topik sesuai dengan program yang ditetapkan.

Pada tahun 2022, program yang direncanakan disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari KKPrS serta isu yang sedang berkembang secara nasional. Jumlah rapat yang dapat diselenggarakan juga telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang mengalami pemotongan karena adanya pandemic Covid-19. Tema yang dibahas dalam rapat KKPrS adalah tema yang relevan sesuai dengan tugas dan fungsi KKPrS. Materi yang dibahas dikembangkan dari 4 (empat) tugas fungsi KKPrS, antara lain:

1. Melakukan penelaahan dan mengusulkan kebijakan penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
2. Melakukan penelaahan keberterimaan penilaian kesesuaian secara nasional, bilateral, regional dan internasional;
3. Mengusulkan program peningkatan penerapan standar; dan
4. Mengusulkan pengembangan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dan infrastruktur pendukung penerapan standar.

Forum menghasilkan 10 rekomendasi kebijakan untuk dapat menjadi acuan BSN dalam menyusun dan menetapkan kebijakan yang dapat diterapkan guna peningkatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian, sehingga capaian untuk kegiatan ini dapat dikatakan 100%.

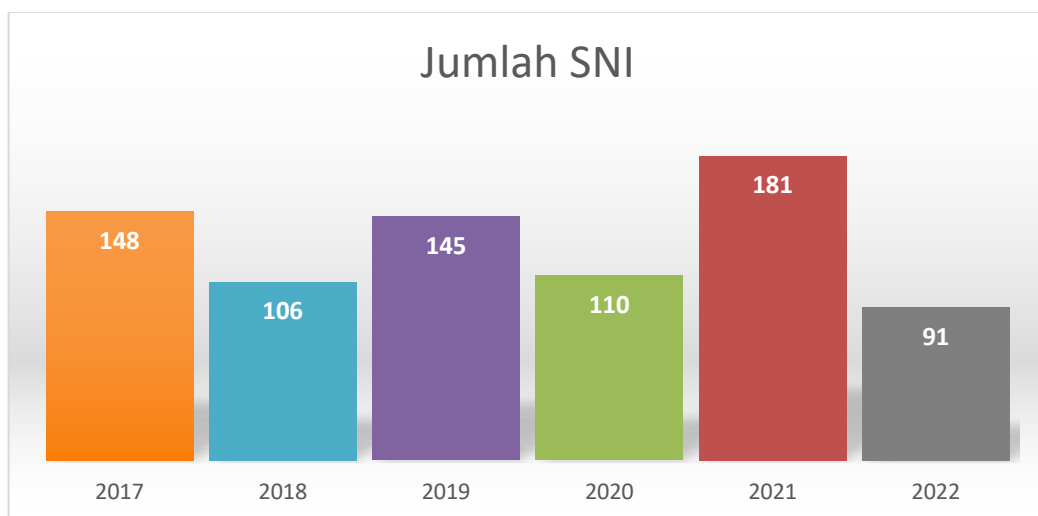
8. Rekomendasi kebijakan masa transisi penerapan SNI

Sesuai dengan pemenuhan tugas dari BSN yaitu menetapkan Rancangan SNI menjadi SNI serta melakukan pemeliharaan SNI melalui kaji ulang dan menghasilkan rekomendasi SNI baru, SNI revisi dan Abolisi SNI, maka Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian memiliki tugas untuk mengkaji masa transisi SNI revisi. Kegiatan kaji ulang masa transisi SNI revisi dilakukan untuk memberikan ruang kepada penerap SNI untuk menyesuaikan perubahan SNI terhadap barang, jasa, sistem, proses dan/atau personal. Penentuan masa transisi pada SNI revisi didasarkan pada jumlah penerap SNI, signifikansi perbedaan SNI lama dan baru, serta kesiapan sarana prasarana dari penerap SNI tersebut. Pembahasan dilakukan dengan berkoordinasi kepada para penerap SNI dalam bentuk rapat koordinasi dan rapat teknis.

Proses kegiatan kaji ulang masa transisi SNI Revisi dilakukan beberapa tahap, diantaranya yaitu:

- Identifikasi SNI, proses ini dilakukan dengan mengelompokkan sesuai jenis SNI (produk, metode uji, sistem, personal, jasa, proses), dan sifat SNI (sukarela/ wajib)
- Pengecekan Penerap SNI, proses ini dilakukan dengan mengecek pada sumber data LPK yang telah diakreditasi oleh KAN baik untuk Laboratorium Uji maupun Lembaga Sertifikasi.
- Analisis Perbedaan SNI, proses ini dilakukan dengan membandingkan SNI lama dan baru sehingga bisa dilihat perubahan yang ada cukup signifikan atau tidak
- Rapat Koordinasi dengan Penerap, rapat ini dilakukan untuk membahas kesiapan penerap, dan *gap analysis* SNI untuk mendapatkan kesepakatan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam masa transisi SNI.

Kegiatan masa transisi dimulai pertama kali pada tahun 2019 yang khusus membahas SNI revisi tahun 2017-2018 yang belum ditetapkan masa transisinya. Jumlah SNI revisi yang telah masuk datanya dari bagian Hukum dari tahun 2017 sampai tahun 2022 sebesar 781 SNI, dengan rincian pada gambar III.6.

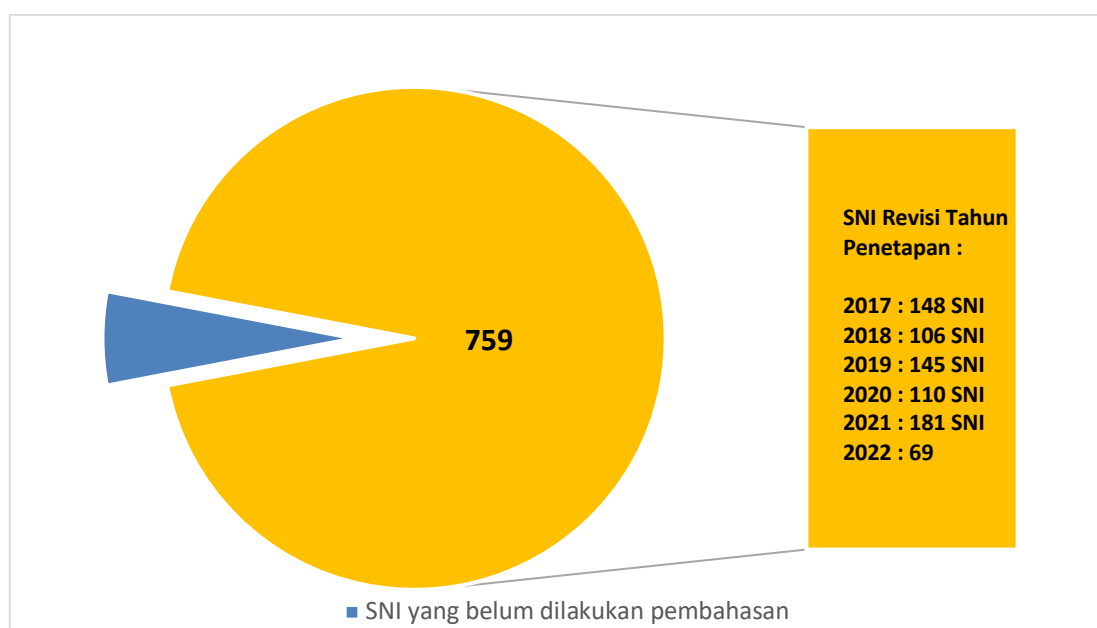


Gambar III. 6
Jumlah Data SNI Revisi dari Bagian Hukum

Kegiatan kaji ulang masa transisi tahun 2021 ini dilakukan minimal 1 bulan 1 kali, dimulai pada bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022. Pembahasan masa transisi ini berdasarkan SK SNI revisi yang terdata dari Bagian Hukum BSN dengan berbagai jenis SNI, antara lain SNI metode uji, SNI produk, SNI sistem maupun SNI proses.

Sampai dengan tahun 2022, total SNI revisi yang dibahas sebanyak 759 SNI, terdiri dari SNI revisi penetapan tahun 2017 sebanyak 148 SNI, tahun 2018 sebanyak 106 SNI, tahun 2019 sebanyak 145 SNI, tahun 2020 sebanyak 110 SNI, SNI tahun 2021 sebanyak 181 SNI dan SNI tahun 2022 sebanyak 69. Adapun gambaran dari hasil pembahasan masa transisi serta jumlah SNI yang belum dibahas, dapat dilihat pada gambar III.7.

Dari total SNI revisi tersebut menghasilkan 11 kebijakan masa transisi yang dinyatakan dalam 10 usulan penetapan masa transisi. Hal ini sesuai dengan target yang diharapkan yaitu adanya 10 kebijakan berbasis penelitian dalam rangka penetapan masa transisi SNI sukarela, sehingga seluruh capaian di tahun 2022 untuk kegiatan masa transisi SNI revisi 100% terpenuhi. Data masa penetapan masa transisi yang telah dibahas dapat dilihat pada lampiran II.



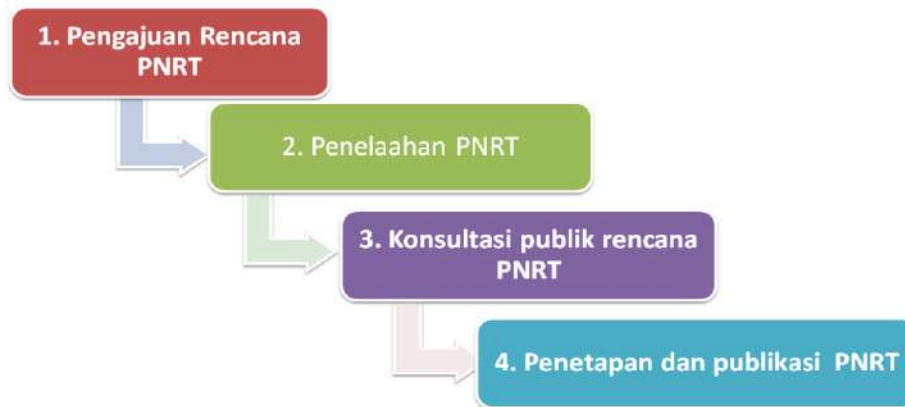
Gambar III. 7
Perkembangan Data SNI Revisi s.d Tahun 2022 yang Telah Dibahas

Tabel III.14
Keputusan Kepala BSN Tentang Penetapan Masa Transisi SNI Tahun 2022

No	Nomor	Judul	Ruang Lingkup
1	85/KEP/BSN/4/2022	PENCABUTAN 11 (SEBELAS) STANDAR NASIONAL INDONESIA	Perikanan
2	131/KEP/BSN/5/2022	PENETAPAN MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI TAHUN 2022	Pangan
3	228/KEP/BSN/7/2022	PENCABUTAN SNI IEC/ISO 31010:2016 MANAJEMEN RISIKO TEKNIK PENILAIAN RISIKO	Manajemen Risiko
4	229/KEP/BSN/7/2022	PENCABUTAN SNI 7188.7:2016 KRITERIA EKOLABEL - BAGIAN 7: KATEGORI PRODUK TAS BELANJA PLASTIK DAN BIOPLASTIK MUDAH TERURAI	Ekolabel
5	231/KEP/BSN/7/2022	PENETAPAN 12 (DUA BELAS) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI TAHUN 2022	Material, Peternakan dan Perikanan
6	353/KEP/BSN/9/2022	PENETAPAN 9 (SEMBILAN) MASATRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI TAHUN 2022	Kendaraan & Peralatan, Perkebunan dan Kimia
7	354/KEP/BSN/9/2022	PENCABUTAN 1 (SATU) STANDAR NASIONAL INDONESIA YANG DIREVISI	Analisis Sensori
8	386/KEP/BSN/10/2022	PENETAPAN 10 (SEPULUH) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI TAHUN 2022	Bangunan Kapal & Konstruksi Kelautan
9	555/KEP/BSN/12/2022	PENCABUTAN 1 (SATU) STANDAR NASIONAL INDONESIA	Produk Kopi
10	556/KEP/BSN/12/2022	PENETAPAN 5 (LIMA) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI TAHUN 2022	Makanan dan Minuman

9. Rekomendasi Program Nasional Regulasi Teknis

Sesuai PBSN 7 Tahun 2020, Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT) adalah usulan regulasi teknis pemberlakuan SNI secara wajib yang akan dirumuskan dan ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian berdasarkan tata cara pemberlakuan regulasi teknis yang baik. Proses publikasi dan penetapan PNRT mencakup:



Gambar III. 8 Mekanisme PNRT Sesuai PBSN No.7 Tahun 2020

PNRT yang ditetapkan untuk tahun 2022 mencakup 24 judul SNI terdiri dari usulan 1 SNI dari BATAN/BRIN, 1 SNI dari BIG dan 22 SNI dari Kemenperin (Daftar lengkap sebagaimana lampiran III. Selanjutnya telah ditindaklanjuti oleh K/L terkait dengan pembahasan pada tahun 2022 sebanyak 4 SNI, dengan rincian:

- 3 SNI terkait kaca untuk bangunan – kaca isolasi, Kaca Isolasi untuk Ruang dan Lemari Pendingin, Kaca Pengaman untuk Sarana Perkeretaapian yaitu SNI ISO 20492-2:2014, SNI 8801:2019, SNI 8822:2019, usulan regulasi teknis dari Kementerian Perindustrian.
- 1 SNI terkait profil metadata spasial Indonesia, SNI 8843-1:2019, usulan regulasi teknis dari BIG.

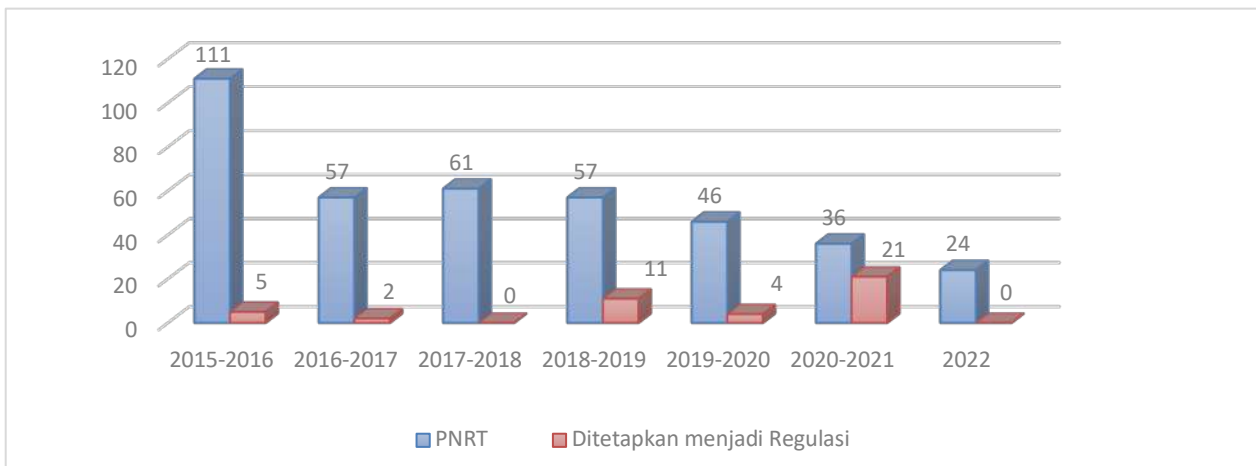
Selain itu, Pada tahun 2022 juga dilakukan pembahasan kajian RIA, perumusan regulasi teknis dan/atau evaluasi pemberlakuan untuk 16 SNI, yaitu terkait:

- 5 SNI Bahan baku plastik untuk Polipropilena, Polietilena (PE), Polipropilena kopolimer impak untuk komponen otomotif, Polietilena massa jenis tinggi dengan klasifikasi PE100 untuk aplikasi pipa penyaluran bahan bakar gas, Resin polivinil klorida (PVC), SNI 0594:2011, SNI 7808:2012, SNI 8432:2017, SNI 8887:2020, SNI 59:2017;
- 2 SNI terkait Sarden dan makerel dalam kemasan kaleng, tuna dalam kemasan kaleng untuk revisi SNI 8222:2016 dan SNI 8223:2016;
- 2 SNI terkait Kompor Gas LPG dan LNG/NG Tekanan Rendah untuk Rumah Tangga, Kompor Gas LPG dan LNG/NG untuk komersial, SNI 8660:2018, SNI 7613:2019;
- 2 SNI terkait Modul LED, Lampu LED swa-balast, SNI IEC 62612:2016, SNI IEC PAS 62717:2015;
- 2 SNI terkait Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara dan Tahan Api dari Mineral Wool dan amandemennya, SNI 8421:2017, SNI 8421:2017/Amd.1:2020;

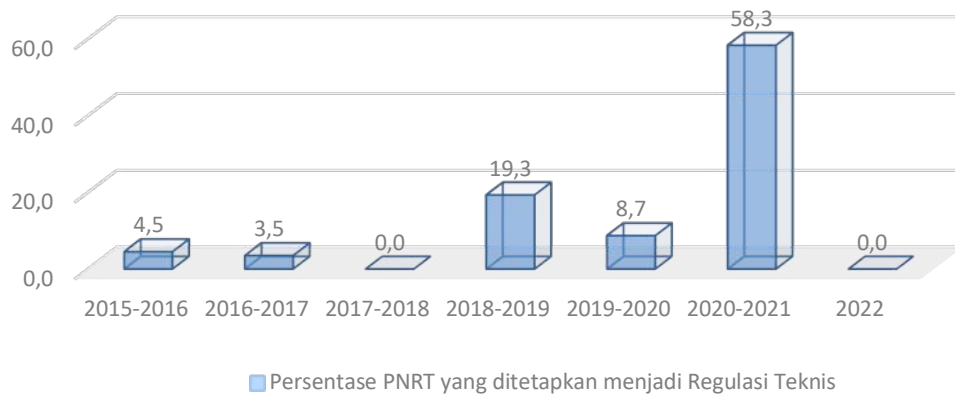
- 1 SNI terkait Sistem Jaminan Kuantitas Untuk Akuntabilitas dan Transparansi Alir Kuantitas Sub Bidang Migas, SNI 9040:2021;
- 1 SNI Kertas Pembungkus Rokok, SNI 3755:2019 dan;
- 1 SNI Pati Jagung, SNI 8523:2018.

Sehingga capaian pembahasan kebijakan harmonisasi regulasi berbasis SNI selama tahun 2022 yaitu 20 kebijakan yang ditindaklanjuti.

Sedangkan untuk persentasi PNRT dan penetapan regulasi dari PNRT yang diusulkan dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar III. 9 Progres PNRT dan Regulasi Yang Ditetapkan Periode 2015-2022



Gambar III. 10 Persentase PNRT menjadi Regulasi Teknis Periode 2015-2022

Adapun pada tahun 2023, BSN telah menerima 59 usulan rencana PNRT terdiri dari 1 usulan SNI ESDM, 1 SNI usulan BIG, 2 SNI usulan KKP, serta 49 SNI dan 6 Non-SNI usulan Kementerian Perindustrian untuk dapat ditetapkan menjadi wajib. Terhadap usulan tersebut telah dilakukan penelaahan berdasarkan validitas SNI, kesiapan Lembaga penilaian kesesuaian, pelaku usaha serta potensi duplikasi dengan regulasi yang telah berlaku dan

pertimbangan analisis dampak regulasi. Rencana pemberlakuan SNI secara wajib tahun 2023 tersebut telah ditayangkan pada website BSN untuk mendapat masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan, terhitung tanggal 4 November sampai 4 Desember 2022. Dalam tahap konsultasi publik terdapat masukan dari *stakeholder* terkait pati jagung (SNI 8523:2018) dan telah dilakukan koordinasi dan tindak lanjut dengan pihak terkait.

Berdasarkan hasil verifikasi dan konfirmasi K/L, penetapan PNRT tahun 2023 adalah 52 SNI karena:

- terdapat duplikasi pengajuan untuk pemberlakuan SNI BjLS (Baja Lembaran Lapis Seng) warna; dan
- terdapat 6 pengajuan non-SNI yang tidak dapat masuk dalam PNRT mengingat hal ini diluar cakupan dalam PBSN 7 tahun 2020, bahwa usulan PNRT hanya berlaku untuk SNI yang akan diberlakukan secara wajib, dari usulan PNRT yang diajukan oleh Kemenperin. Sehingga rencana PNRT kemenperin yang dilanjutkan terdapat 48 Usulan SNI valid.

Rincian PNRT Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.15
Rencana dan Penetapan PNRT 2023

No	Kementerian/ Lembaga	Jumlah			Keterangan
		PNRT	Rencana PNRT	Lanjutan PNRT tahun sebelumnya	
1	Kementerian Perindustrian	48 SNI	– 48 SNI valid – 1 SNI duplikasi – 6 Non-SNI	22 SNI	Non-SNI: PTC CPPOB, PTC GMP dan ST
2	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2 SNI	2 SNI	-	Revisi PermenKP No.58/Permen- KP/2016 merujuk pada SNI termutakhir
3	Kementerian ESDM	1 SNI	1 SNI	-	-
4	BIG	1 SNI	1 SNI	1 SNI	-
Jumlah		52 SNI	53 SNI + 6 Non SNI	23 SNI	

PNRT tersebut telah dilakukan publikasi melalui sistem informasi BSN, serta disampaikan kepada K/L terkait. Sebagaimana ketentuan dalam PBSN No.7 Tahun 2020, dalam hal mendesak, K/L terkait dapat mengusulkan pengurangan atau penambahan terhadap SNI yang akan diberlakukan wajib dalam PNRT. Penetapan 52 SNI dalam PNRT 2023 sebagaimana Lampiran IV sebagai skala prioritas bagi K/L terkait dalam merumuskan regulasi teknis berbasis SNI.

Dari total SNI dalam PNRT 2023 terdapat 14 (empat belas) SNI yang akan diberlakukan wajib yang telah tersedia kajian analisis dampak regulasi (RIA) dan beberapa telah dilakukan notifikasikan dalam forum TBT-WTO, diantaranya sebagai berikut:

Tabel III.16
Ketersediaan RIA dan Progres PNRT 2023

No	No dan Judul SNI PNRT 2023 yang telah disertai RIA	Kementerian Pengusul	Keterangan (Progres)	
1.	SNI 8421:2017, Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara dan Tahan Api dari Mineral Wool	Kementerian Perindustrian	Telah dinotifikasikan ke TBT/WTO (G/TBT/N/IDN/130) dan tidak ada tanggapan dari negara anggota WTO	
2.	SNI 8421:2017/Amd.1:2020 Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara, dan Tahan Api dari Mineral Wool Amandemen 1			
3.	SNI 8887:2020, Polietilena massa jenis tinggi dengan klasifikasi PE100 untuk aplikasi pipa penyaluran bahan bakar gas		Telah dinotifikasikan ke TBT/WTO/ (G/TBT/N/IDN/151) dan tidak ada tanggapan dari negara anggota WTO	
4.	SNI 7593:2020, Polietilena massa jenis tinggi (high density polyethylene/HDPE) untuk bahan baku pipa air minum			
5.	SNI 7808:2018, Biji plastik polietilena			
6.	SNI 0594:2011, Polipropilena			
7.	SNI 8432:2017, Polipropilena kopolimer impak untuk komponen otomotif			
8.	SNI 59:2017, Resin Polivinil Klorida (PVC)			
9.	SNI 180:2021, Alat Pemadam Api Portabel (APAP)			Telah dinotifikasikan ke TBT/WTO(G/TBT/N/IDN/150) dan tidak ada tanggapan dari negara anggota WTO
10.	SNI 3755:2019, Kertas Pembungkus rokok			Kajian dan pembahasan pemberlakuan
11.	SNI 8660:2018, Kompor Gas LPG dan LNG/NG Tekanan Rendah untuk Rumah Tangga	Kajian dan pembahasan pemberlakuan		
12.	SNI 7613:2019, Kompor Gas LPG dan LNG/NG untuk Komersil	Kajian dan pembahasan pemberlakuan		
13.	SNI 9040:2021, Sistem Jaminan Kuantitas Untuk Akuntabilitas dan Transparansi Alir Kuantitas Sub Bidang Migas-Persyaratan	Kementerian ESDM	Kajian dan pembahasan pemberlakuan	
14.	SNI 8843-1:2019, Profil metadata spasial Indonesia - Bagian 1: Fundamental (ISO 19115-1:2014,MOD)	BIG	Kajian dan pembahasan pemberlakuan, tidak dinotifikasikan karena tidak terkait perdagangan internasional	

Capain lainnya terkait kegiatan harmonisasi regulasi teknis berbasis SPK adalah

1. **Koordinasi dan fasilitasi pembahasan regulasi teknis yang dilakukan sejak perumusan sampai telah ditetapkan di Tahun 2022** untuk 2 regulasi teknis yang ditetapkan. Regulasi tersebut yaitu Keputusan Menteri ESDM Nomor 135.K.EK.07/DJE/2022 tentang standar kinerja energi minimum dan label tanda hemat energi untuk peralatan pemanfaat energi lampu light-emitting diode (LED) dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri sebagai revisi dari Peraturan Menteri Perindustrian No.86 Tahun 2019.
2. **Koordinasi dan fasilitasi pembahasan regulasi teknis lainnya diluar usulan PNRT**, yaitu keterlibatan BSN dalam memberikan masukan dan tanggapan untuk beberapa regulasi, rencana kajian pemberlakuan, permintaan audiensi, pembahasan mekanisme pengawasan serta evaluasi pemberlakuannya yaitu:
 - a. **Berbasis SNI**

Tabel III.17
Fasilitasi Pembahasan Regulasi Teknis Berbasis SNI

No.	Pembahasan
(1)	Pembahasan Skema Revisi Pemberlakuan SNI tentang Sepatu pengaman secara wajib
(2)	Audiensi SNI tentang Produk Gula
(3)	Audiensi SNI tentang Produk mainan anak
(4)	Pengawasan penerapan SNI tentang ampul dan vial gelas/kaca untuk obat suntik impor
(5)	Petunjuk teknis pengawasan SNI tentang kompor gas
(6)	Pembinaan dan pengawasan SNI tentang Modul fotovoltaik silikon kristalin
(7)	Penerapan SNI tentang Katup tabung LPG
(8)	Penerapan SNI Produk peranti listrik rumah tangga (Peralatan Dapur dan Pemanas Cairan) secara wajib
(9)	Penerapan SNI tentang Produk tekstil
(10)	Investasi dan Penerapan SNI tentang produk elektronika
(11)	Koordinasi Pemberlakuan SNI Wajib sektor ILMATE
(12)	Koordinasi penyusunan revisi Permenperin No. 23/M-IND.PER/4/2013 tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada bahan Kimia dan menindaklanjuti penetapan SNI 9030-1 :2021 dan 9030-2 :2021
(13)	Koordinasi Penerapan dan Skema sertifikasi SNI tentang IndoGap Tanaman Pangan
(14)	Sosialisasi Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2021 tentang Standardisasi Di Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia dan/atau Tanda Keselamatan
(15)	Penyusunan SNI tentang Minyak makan merah dan potensi penerapannya
(16)	Penyusunan RSNI tentang Knalpot dan rencana penerapannya
(17)	Kebijakan Larangan dan Pembatasan Produk Ber-SNI
(18)	Identifikasi Permasalahan Penerapan SNI Produk Katup Tabung Baja LPG
(19)	Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang Pembinaan dan Pengawasan Standar dan Mutu (Spesifikasi) Pelumas yang Dipasarkan di Dalam Negeri

No.	Pembahasan
(20)	Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengawasan Pangan Fortifikasi Tahun 2022
(21)	Pembahasan benih tanaman pangan bertanda SNI

b. Berbasis SPK lainnya

Tabel III.18
Fasilitasi Pembahasan Regulasi Teknis Berbasis SPK

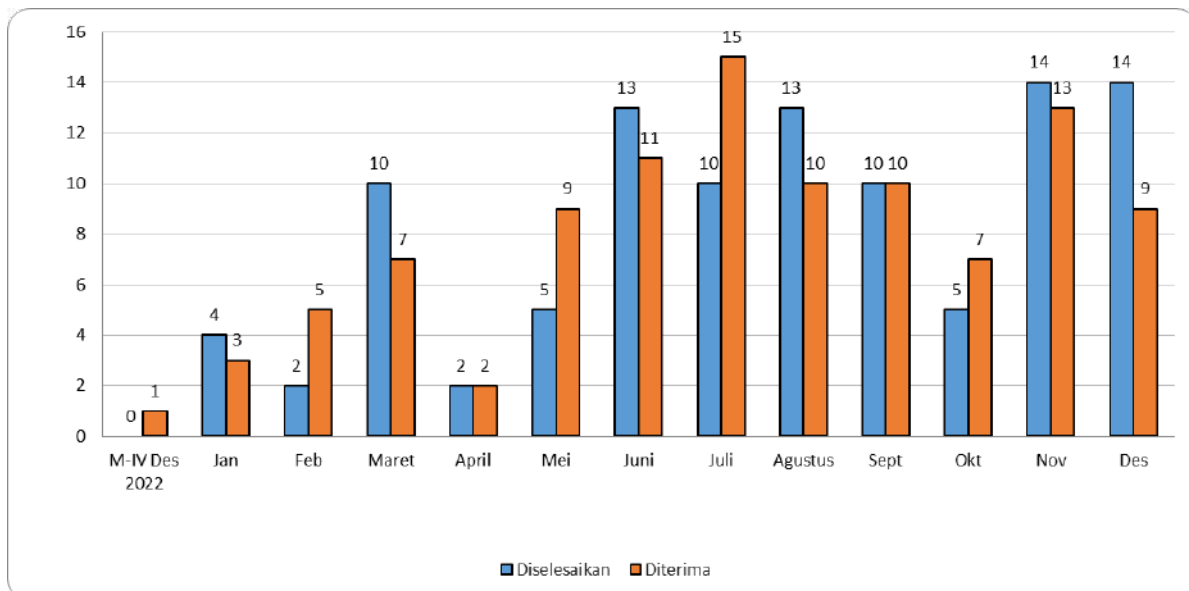
No.	Pembahasan
(1)	Pembahasan Rancangan Peraturan BAPANAS tentang Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar
(2)	Pembahasan Rancangan Peraturan BAPANAS tentang Kategori dan label pangan segar
(3)	Pembahasan Rancangan Peraturan BAPANAS tentang Persyaratan mutu dan label beras
(4)	Pembahasan Revisi Peraturan BPOM No. 34 Tahun 2019 tentang Kategori pangan olahan
(5)	Pembahasan Rancangan Peraturan BPOM tentang Registrasi pangan olahan
(6)	Pembahasan Rancangan Pedoman BIG tentang Penyusunan Standar Penyelenggaraan Informasi Geospasial
(7)	Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari UU No. 20 Tahun 2019 tentang Sistem budidaya pertanian berkelanjutan
(8)	Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan pembangunan pergaraman nasional
(9)	Pembahasan Rancangan Pedoman Batasan maksimum residu pestisida dalam pangan olahan
(10)	Pembahasan pengawasan PP No. 5 Tahun 2021 untuk sektor Kemenparekraf
(11)	Kajian terkait Produk wajib bersertifikat halal di Indonesia
(12)	Koordinasi dan Kajian terkait Laboratorium Halal di Labkesda
(13)	Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga Dimetil Eter sebagai bahan bakar
(14)	Harmonisasi Rancangan Peraturan Kementerian Kominfo tentang Penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan izin kelas
(15)	Mekanisme Pengawasan Perizinan Berusaha dan Kepatuhan Melaksanakan Standar dan Sertifikasi Usaha Sektor Parekraf Berbasis Risiko

3. **Finalisasi Rancangan Panduan Pemilihan Prosedur Penilaian Kesesuaian** dengan informasi penilaian risiko untuk produk *Electrical and electronic equipment* yang diadopsi dari dokumen ASEAN Risk Assessment Guidelines, dan hasil dari pertemuan *ISO virtual regional workshop on the use of conformity assessment activities and tools to achieve better regulatory outcomes*.
4. **Penyelesaian Permasalahan dalam penerapan standar**, baik berupa pertanyaan atau keluhan, dapat disampaikan oleh pemangku kepentingan, termasuk para pelaku usaha atau pihak penegak hukum dalam hal pengawasan, kepada BSN secara langsung atau melalui media elektronik seperti *electronic mail (e-mail)*, telepon, sms,

fax, dan whatsapp. Permohonan penyelesaian permasalahan ini juga berdasarkan tindaklanjut dari pertanyaan yang disampaikan oleh stakeholder terkait melalui Pusat Hubungan masyarakat, Kerjasama, Layanan informasi BSN untuk ditindaklanjuti oleh unit teknis terkait di BSN termasuk Dit.SPSPK untuk penerapan SPK. Terkait penerapan standar, penanganan permasalahan penerapan standar dilakukan dengan menganalisis substansi permasalahan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, SNI, atau literatur lainnya yang relevan. Apabila diperlukan tindak lanjut atau informasi lainnya, maka akan dikoordinasikan dengan pihak terkait seperti regulator yang memberlakukan SNI secara wajib. Selanjutnya hasil analisis akan disampaikan kepada pihak pemohon terkait.

Selama tahun 2022, telah dilakukan penyelesaian terhadap 102 permohonan stakeholder yang diterima (101 yang diterima di tahun 2022 dan 1 yang diterima di di akhir tahun 2021) dengan jenis layanan terkait:

- Permintaan keterangan status pemberlakuan standar, mengenai: Produk/Standar
- Kebutuhan ketersediaan LPK untuk fasilitasi penerapan standar
- Permintaan informasi mengenai cara menerapkan SNI, termasuk tata cara memperoleh sertifikat SNI atau aturan impor, untuk: produk
- Permintaan penjelasan terkait isi/substansi standar
- Permohonan Saksi Ahli dan Pengisian BAP
- Pengaduan Penerapan SNI
- Lain-lain



Gambar III. 11 Grafik Penanganan Permasalahan Penerapan SPK

Dalam hal ini, seluruh aduan tersebut (100%) telah ditindaklanjuti dengan menyampaikan informasi atau klarifikasi melalui surat atau komunikasi langsung dengan pihak yang menyampaikan aduan tersebut (stakeholder). Stakeholder tersebut diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, antara lain Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), Industri/Perusahaan, Instansi Pemerintah, Asosiasi, dan Masyarakat Umum.

Tabel dibawah ini merupakan data penanganan permasalahan penerapan SNI yang telah ditindaklanjuti pada tahun 2022. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pengaduan/permohonan informasi yang diterima adalah terkait permohonan keterangan status pemberlakuan standar apakah wajib atau sukarela dengan persentase 57% dari jumlah pengaduan yang diselesaikan di tahun 2022.

Tabel III.19
Data Jenis Penanganan Permasalahan Penerapan SNI

No	Jenis Pengaduan	Jumlah	Topik Aduan	Jumlah
1	Permintaan keterangan status pemberlakuan standar, mengenai: Produk/Standar	58	Permohonan informasi status pemberlakuan / kewajiban penerapan SNI	58
2	Kebutuhan ketersediaan LPK untuk fasilitasi penerapan standar	1	Informasi Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) untuk Kampas Rem Mobil	1
3	Permintaan informasi mengenai cara menerapkan SNI, termasuk tata cara memperoleh sertifikat SNI atau aturan impor, untuk: produk	23	Permohonan informasi terkait cara menerapkan SNI, termasuk tata cara memperoleh sertifikat SNI atau aturan impor	23
4	Permintaan penjelasan terkait isi/substansi standar	1	Informasi SNI yang telah ditetapkan untuk produk terkait	1
5	Permohonan Saksi Ahli dan Pengisian BAP	7	Pengisian BAP dan menjadi Saksi Ahli	7
6	Pengaduan Penerapan SNI	4	Informasi Isu/Permasalahan terkait penerapan SNI di lapangan	4
7	Lain-lain	8	a.) Informasi terkait Regulasi Teknis SPK	2
			b.) Permohonan informasi untuk mendapat SPPT SNI/fasilitasi untuk klarifikasi/konfirmasi	2
			c.) Permohonan informasi terkait PNRT	2
			d.) Permohonan Audiensi, Webinar dan Wawancara	2

Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholder, maka diperlukan upaya perbaikan kedepan, antara lain: koordinasi yang lebih erat dengan Kementerian/Lembaga dan stakeholders terkait dan rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang disampaikan harus sesuai dengan kebutuhan stakeholders.

Tabel III.20
Capaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2022			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
			Target	Realisasi	%*)	Target	% capaian
1. Presentase instansi pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2	Presentase	15 Organisasi dari Target 10 Organisasi (150%)	50	53	106%	70	73,6%

Sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional merupakan sistem yang bersifat horizontal, yang menjadi landasan penerapan SPK bagi kementerian dan lembaga sesuai dengan kepentingan sektor dan regulasi di masing-masing sektor, termasuk dalam kerangka penerapan dan pelayanan SPK oleh pihak pemerintah maupun swasta.

Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) merupakan cara kerja (kerangka) terbaik dalam penerapan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional, yang bertujuan untuk memastikan Kementerian /Lembaga/stakeholder untuk menerapkan kegiatan SPK secara efektif dan efisien sesuai tata kelola SPK di sektornya masing masing. Dalam Tata kelola SPK terdapat 4 (empat) elemen utama yang membentuk rantai nilai SPK sehingga dapat dilihat tingkat maturitas penerapan SPK di K/L, yaitu elemen pengembangan standar, elemen penerapan SPK, elemen penilaian kesesuaian dan ketertelusuran pengukuran, dan elemen *learning and growth*.

Berdasarkan kerangka tersebut dalam rencana strategis BSN tahun 2020-2024, tata kelola SPK ditetapkan sebagai strategi ke-3 yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola SPK secara komprehensif dan menyeluruh, Strategi ini merupakan upaya dalam membangun dan memperbaiki tata kelola SPK di K/L sesuai dengan ketentuan, lebih lanjut dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap SPK, serta penguatan infrastruktur mutu. Agar pelaksanaan evaluasi penerapan tata kelola SPK di organisasi pemerintah berjalan secara efektif maka dikembangkan "Panduan, kriteria dan indikator evaluasi tata kelola SPK". Panduan ini juga digunakan sebagai alat evaluasi tingkat maturitas tata kelola SPK.

Kegiatan Tata kelola SPK pada tahun 2022 diantaranya sbb:

1. Koordinasi dan kelengkapan dari penilaian mandiri lokus lama Tahun 2021;
2. Identifikasi, Sosialisasi dan pembimbingan pengisian kriteria dan indikator penilaian tata Kelola SPK pada lokus baru Tahun 2022;
3. Pelaksanaan FGD Verifikator untuk pembekalan dalam melakukan evaluasi dan

- pembobotan indeks maturitas tata Kelola SPK;
4. Pelaksanaan verifikasi penerapan tata kelola SPK pada organisasi pemerintah dengan melibatkan verifikator dari wakil organisasi yang menjadi lokus penilaian;
 5. Tindaklanjut verifikasi untuk pembahasan indeks maturitas tata Kelola SPK dan *feedback* berupa kekuatan dan rekomendasi untuk masing-masing organisasi pemerintah yang terlibat;
 6. Penyampaian penghargaan Indeks Maturitas Tata Kelola SPK dalam rangkaian Bulan Mutu Nasional (BMN);
 7. Audiensi dan Diskusi tindak lanjut *feedback* tata kelola SPK untuk Pemprov Jabar yang diwakili oleh 4 OPD terkait dengan kegiatan SPK.

Pelaksanaan verifikasi penilaian penerapan tata kelola SPK pada tahun 2022 dilakukan terhadap 15 lokus organisasi pemerintah sebagaimana tabel terlampir.

Tabel III.21
Lokus Organisasi Evaluasi Penerapan Tata Kelola SPK

Organisasi	<i>Pilot Project</i> Tahun 2020	Tahun 2021-2022 (lokus lama)	Tahun 2022 (lokus baru)
Pemerintah Pusat	Kementerian ESDM 1. Dit. Teknik dan Lingkungan: - Ketenagalistrikan - Mineral dan Batubara - Baru Terbarukan - Minyak dan Gas Bumi 2. Dit. Konservasi Energi 3. Dit. Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan	Kementerian ESDM 1. Dit. Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan 2. Dit, Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batu Bara	
	Kementerian Perdagangan Dit. Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Kementerian Perdagangan Dit. Standardisasi dan Pengendalian Mutu	
	Kementerin PUPR 1. Bina dan Teknik Jalan dan Jembatan 2. Bina dan Teknik Sumber Daya Air	Kementerian PUPR 1. Bina dan Teknik Jalan dan Jembatan 2. Bina dan Teknik Sumber Daya Air	

Organisasi	Pilot Project Tahun 2020	Tahun 2021-2022 (lokus lama)	Tahun 2022 (lokus baru)
	3. Bina dan Teknik Permukiman dan Perumahan		
	Kementerian Perindustrian Pusat Standardisasi Industri	Kementerian Kelautan dan Perikanan Dit. Pengolahan dan Bina Mutu	
		BIG Dit. Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial	
		Badan Riset dan Inovasi Nasional PRTKMMN (PSMN-ex Batan)	
		BSSN (tidak melanjutkan verifikasi)	
Pemerintah Daerah	Pemprov Jawa Barat, 11 OPD dari 5 Dinas: 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 3. Dinas Kelautan dan Perikanan 4. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 5. Dinas Kehutanan	Pemprov Jawa Barat Dinas Kelautan dan Perikanan	Pemkot Surakarta
		Pemprov Jawa Timur 1. Dinas Perhubungan 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3. Dinas PU-SDA 4. Dinas PU Bina Marga 5. Dinas Sosial	Pemkab Purbalingga (tidak menyampaikan isian kuesioner)
		Pemprov Sulawesi Selatan 1. Dinas Ketahanan Pangan 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 4. Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Pemprov Sumatera Selatan Dinas Perindustrian	
		Pemprov Sumatera Barat 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Organisasi	Pilot Project Tahun 2020	Tahun 2021-2022 (lokus lama)	Tahun 2022 (lokus baru)
		2. Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Pemprov Riau Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	

Verifikasi dilakukan terhadap 15 organisasi dan disampaikan hasil penilaian evaluasi tata Kelola SPK dalam rangkaian Bulan Mutu Nasional Tahun 2022 di Palembang. Adapun hasil rekapitulasi indeks maturitas Tata Kelola SPK Tahun 2022 sebagaimana tabel terlampir.

Tabel III.22
Rekapitulasi Indeks Maturitas Tata Kelola SPK

Organisasi Pemerintah	Tahun 2022	
	Rata-Rata	Jumlah Organisasi Pemerintah
K/L	2,2	8
Pemerintah Daerah	1,6	7

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran ke 2 yaitu Persentase instansi pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2 tercapai 53% (8 organisasi Pemerintah). Adapun untuk kumulatif % capaian hanya dapat dihitung dari 2021 s.d 2022 (target satuan nilai maturitas) yaitu senilai 73,6 % karena perbedaan indikator kinerja dengan tahun 2020 (target satuan jumlah organisasi yang terlibat) dalam Renstra.

Menindaklanjuti kegiatan tata Kelola SPK yang telah dilakukan sejak *pilot project* Tahun 2020 sd Tahun 2022, dilakukan audiensi dan diskusi tindaklanjut secara fisik pertama kali pada 9 Desember 2022 terhadap perkembangan dan implementasi tata Kelola SPK di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hasil audiensi dan evaluasi terhadap kuesioner secara langsung memberikan hasil efektif dan dapat menangkap kondisi SPK dan kebutuhan SPK di daerah yang mendorong pencapaian tujuan nasional.

Untuk meningkatkan Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, diperlukan upaya perbaikan kedepannya, yaitu antara lain: meningkatkan pemahaman mengenai Tata Kelola SPK terutama di tingkat Pemerintah Daerah, serta direkomendasikan untuk pelaksanaan evaluasi penerapan tata Kelola SPK ditahun selanjutnya diharapkan dapat dilaksanakan secara fisik khususnya untuk Pemerintah Daerah dan dibutuhkan dukungan sumber daya dalam mendukung pencapaian target Renstra.

SASARAN 3**Meningkatnya produk bertanda SNI yang beredar terhadap persyaratan SNI yang di tetapkan**

Sasaran ketiga adalah Meningkatkan produk bertanda SNI yang beredar terhadap persyaratan SNI yang ditetapkan. Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran ke-3, Persentase produk bertanda SNI (yang dimonitor) yang memenuhi persyaratan SNI. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut melebihi 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 3.

Tabel III.23
Capaian Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	Capaian 2022			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
			Target	Realisasi	%*)	Target	% capaian
Persentase produk bertanda SNI (yang dimonitor) yang memenuhi persyaratan SNI	Persentase	61,4	60	61,45	102,42	70	87,78

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN melakukan uji petik kesesuaian untuk memastikan efektivitas penerapan SNI serta mengetahui manfaat dan kendala penerapan SNI bagi penerap. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, BSN berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. Hasil uji petik kesesuaian terhadap SNI disampaikan kepada KAN, instansi pembina, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab melakukan pengawasan pasar sebagai masukan untuk tindak lanjut yang diperlukan.

Dari pengamatan terhadap penggunaan Tanda SNI, pencantuman Tanda SNI pada barang yang beredar di pasar dapat digolongkan menjadi 4 kelompok:

1. Pencantuman Tanda SNI pada produk oleh pelaku usaha berdasarkan SPPT SNI yang diberikan oleh BSN. Penerbitan BSN SPPT SNI berdasarkan sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai dengan ruang lingkup akreditasinya.
2. Pencantuman Tanda SNI pada produk oleh pelaku usaha berdasarkan SPPT SNI yang diberikan oleh BSN. Dimana BSN menerbitkan SPPT SNI berdasarkan sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang ditunjuk oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).
3. Pencantuman Tanda SNI pada produk oleh pelaku usaha berdasarkan SPPT SNI yang diberikan oleh regulator melalui LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup akreditasinya dan ditunjuk oleh regulator.

4. Pencantuman Tanda SNI pada produk oleh pelaku usaha berdasarkan SPPT SNI yang diberikan regulator oleh melalui LSPro yang ditunjuk olehnya.

Untuk melihat efektivitas penerapan SNI pada barang yang beredar di pasar, maka dilakukan kegiatan uji petik. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2022, BSN berkoordinasi dan bekerja sama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, melakukan kegiatan uji petik di beberapa kota di Indonesia.

Pelaksanaan koordinasi kegiatan uji petik dilaksanakan pada Januari tahun 2022 yang dihadiri oleh wakil dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan Badan Standardisasi Nasional berhasil menyepakati program Kegiatan Uji Petik Tahun 2022 menetapkan 8 (delapan) kelompok produk yang akan disampling dan 2 (dua) SNI bidang jasa dan sistem.

Pada bulan Februari 2022, dilaksanakan kegiatan penyusunan panduan pelaksanaan kegiatan uji petik tahun 2022 yang berisi acuan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga setiap pelaksana uji petik memiliki persamaan persepsi, baik dalam monitoring produk beredar, teknik pengambilan sampel, jenis sampel yang diambil, pengemasan dan pengiriman sampel. Panduan monitoring dan uji petik penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang disusun mencakup produk yang SNI-nya diterapkan secara sukarela dan telah mendapatkan sertifikat/Tanda SNI atau mencantumkan tanda SNI pada produk, yaitu: kerupuk udang, saus cabe, agar-agar tepung, minyak goreng kelapa, madu, lampu LED swa balast, pupuk dolomit, dan handuk.

Panduan ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan uji petik di lokasi yang telah ditetapkan.

Untuk menyamakan pemahaman dan persepsi seluruh personel/tim terhadap pelaksanaan uji petik, maka dilakukan pembekalan pelaksanaan uji petik untuk menginformasikan mengenai panduan pelaksanaan yang telah disusun serta persiapan pelaksanaan lainnya.

Pengambilan sampel dilakukan oleh Tim Uji Petik dari Badan Standardisasi Nasional. Tim tersebut memiliki tugas untuk melakukan kegiatan monitoring dan uji petik untuk produk beredar di masyarakat baik yang dijual di e-commerce maupun di pasar yang selanjutnya akan diuji kesesuaiannya dengan persyaratan SNI di laboratorium yang sudah diakreditasi KAN.

Kegiatan monitoring produk dan pengambilan sampel produk dilaksanakan pada bulan Maret hingga Juni 2022 di 19 kota dan 2 kabupaten di Indonesia, dengan total pengambilan sampel sebanyak 83 merek. Pada tahun 2022 disebabkan karena masih berlangsungnya pandemi Covid-19 di Indonesia, selain melakukan uji petik secara langsung di pasar tradisional maupun pasar modern, uji petik juga dilakukan secara daring dengan melakukan pembelian sampel produk melalui produsen dan e-commerce. Pengambilan sampel produk uji petik secara langsung dilakukan di Kota Tangerang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Solo, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Medan, Kota Payakumbuh, Kota Padang, Kota Makassar,

Kota Banjarmasin, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Banjar. Sedangkan pembelian secara daring dilakukan di Kota Pekanbaru, Kota Palembang, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Surabaya, Kota Jakarta Barat, dan Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan hasil uji petik barang tahun 2022 tingkat pemenuhan produk terhadap persyaratan mutu SNI mencapai 61,45%, dimana target di tahun 2022 sebesar 60% sehingga capaian dibandingkan dengan target sebesar 102,42%.

Semua hasil uji petik 2022 telah disampaikan kepada stakeholder terkait melalui rapat koordinasi dan melalui surat penyampaian hasil uji petik, serta sudah ada tindak lanjut yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Dalam rangka menjaga konsistensi kinerja kegiatan uji petik, maka pada tahun 2022 BSN tetap melanjutkan inovasi seperti tahun sebelumnya, antara lain:

1. Hasil uji petik per produk disampaikan secara langsung kepada stakeholder terkait setelah selesainya proses analisa hasil, dengan tujuan tindak lanjut yang dilakukan tidak berlangsung terlalu lama; dan
2. Pemberian apresiasi kepada penerap SNI yang produknya memenuhi SNI melalui surat dan promosi produk yang memenuhi SNI di media sosial BSN.

Tahapan pelaksanaan monitoring dan uji petik untuk SNI barang digambarkan pada gambar III.12



Gambar III.12 Tahapan pelaksanaan monitoring dan uji petik SNI barang tahun 2022

Pada tahun 2022 juga dilaksanakan kegiatan uji petik SNI bidang jasa dan sistem yaitu untuk SNI CAC/RCP 1:2011 HACCP dan SNI 6729:2016 Sistem Pertanian Organik.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas penerapan SNI CAC/RCP 1:2011 HACCP dan SNI 6729:2016 Sistem Pertanian Organik, serta mengetahui **manfaat** dan kendala dalam penerapannya. Pelaksanaannya dilakukan pada bulan Juni sampai dengan Desember 2022.

Kegiatan ini diawali dengan *sharing knowledge* aturan dan penerapan SNI CAC/RCP 1:2011 HACCP dan SNI 6729:2016 Sistem Pertanian Organik yang dihadiri oleh regulator dan narasumber ahli atau praktisi, dan dilanjutkan dengan penyusunan kuisisioner.

Sasaran dari kuisisioner penerapan SNI CAC/RCP 1:2011 HACCP adalah penerap SNI HACCP. Kemudian untuk sasaran dari kuisisioner penerapan SNI 6729:2016 Sistem Pertanian

Organik adalah penerap SNI Sistem Pertanian Organik, konsumen dan Lembaga Sertifikasi Organik.

Metode yang digunakan dalam uji petik SNI Bidang jasa dan sistem bersifat *cross sectional*, dengan pengumpulan data melalui pengisian survei atau kuisisioner oleh penerap SNI HACCP dan Sistem Pertanian Organik dengan media *google form*.

Penyebaran kuesioner kepada para responden SNI HACCP dan Sistem Pertanian Organik dilakukan melalui surat resmi permintaan pengisian survei serta pelaksanaan sosialisasi kepada penerap dan Lembaga Sertifikasi baik dengan pertemuan langsung maupun daring melalui media *zoom meeting*.

Adapun jumlah responden yang mengisi kuisisioner HACCP sebanyak 72 penerap, sedangkan responden yang mengisi kuisisioner Sistem Pertanian Organik sebanyak 6 Lembaga Sertifikasi, 13 penerap SNI, dan 31 konsumen produk organik. Dalam pelaksanaannya, jumlah responden yang mengisi survei masih belum optimal karena kurangnya kontribusi responden khususnya penerap SNI Sistem Pertanian Organik. Hal ini disebabkan oleh data penerap SNI jasa dan sistem yang masih susah untuk didapat.

Berdasarkan hasil survei, berikut adalah manfaat dan kendala yang dirasakan oleh para responden.

1. Penerap SNI HACCP

a. 4 (empat) manfaat terbesar yang dirasakan oleh penerap SNI HACCP, yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas produk;
- 2) Peningkatan omset penjualan;
- 3) Peningkatan kepercayaan *customer*; dan
- 4) Membantu pengendalian bahaya saat proses produksi.

b. Kendala yang masih dirasakan oleh penerap SNI HACCP, antara lain:

- 1) Pengetahuan dan pemahaman SDM;
- 2) Dukungan anggaran keuangan;
- 3) Harga produk yang cenderung mahal;
- 4) Kebijakan perusahaan; dan
- 5) Sistem dan peraturan PerUndang-Undangan.

2. Lembaga Sertifikasi Organik

a. 4 (empat) manfaat terbesar yang dirasakan oleh Lembaga Sertifikasi Organik, yaitu:

- 1) Ikut serta dalam mendukung pertanian berkelanjutan;
- 2) Peningkatan jumlah klien dan pendapatan Lembaga Sertifikasi Organik;
- 3) Kepercayaan dari produsen dan konsumen bahwa produk organik yang beredar sesuai standar yang ditetapkan; dan
- 4) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pertanian organik.

b. Kendala yang masih dirasakan oleh Lembaga Sertifikasi Organik, antara lain:

- 1) Kesulitan pelaku usaha dalam pemasaran;

- 2) Kurangnya minat pelaku usaha;
 - 3) SDM pelaku usaha yang kurang kompeten;
 - 4) Biaya sertifikasi yang cukup tinggi; dan
 - 5) Kepemilikan lahan.
3. Penerap SNI Sistem Sertifikasi Organik
- a. 5 (lima) manfaat terbesar yang dirasakan oleh Penerap SNI Sistem Sertifikasi Organik, yaitu:
 - 1) Meningkatkan penilaian baik dari masyarakat terhadap perusahaan;
 - 2) Mendukung pertanian berkelanjutan;
 - 3) Meningkatkan kesuburan tanah;
 - 4) Meningkatkan omset penjualan; dan
 - 5) Produk yang dihasilkan menjadi sehat karena tidak ada residu kimia.
 - b. Kendala yang masih dirasakan oleh Penerap SNI Sistem Sertifikasi Organik, antara lain:
 - 1) Dukungan anggaran keuangan untuk sertifikasi;
 - 2) Harga produk yang cenderung mahal;
 - 3) Kebijakan perusahaan; dan
 - 4) Sistem dan peraturan perUndang-Undangan.
4. Konsumen Produk Organik
- a. 5 (lima) manfaat terbesar yang dirasakan oleh konsumen produk organik, yaitu:
 - 1) Ramah lingkungan;
 - 2) Lebih segar dan bertahan lama;
 - 3) Lebih kaya nutrisi;
 - 4) Lebih sehat bagi ibu hamil dan bayi; dan
 - 5) Tidak mengandung antibiotik.
 - b. Kendala yang masih dirasakan oleh konsumen produk organik, yaitu belum rutin mengkonsumsi/menggunakan produk organik karena harga produk organik lebih mahal.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap kegiatan monitoring penerapan SNI HACCP dan Sistem Pertanian Organik, maka dibutuhkan penguatan basis data dan responden survei dengan melakukan pengembangan aplikasi bangbeni, sehingga penerap SNI sistem, proses, personil juga dapat terdata dengan baik. Tahapan pelaksanaan monitoring dan uji petik untuk SNI jasa dan sistem digambarkan pada gambar III.13.



Gambar III.13 Tahapan pelaksanaan monitoring dan uji petik SNI jasa dan sistem tahun 2022

Hasil monitoring dan uji petik 2022 menghasilkan 10 rekomendasi kebijakan dari target di tahun 2022 sebanyak 10 rekomendasi kebijakan sehingga capaian untuk kegiatan ini dapat dikatakan 100%. Selanjutnya hasil uji petik akan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengacu kepada produk yang dilakukan monitoring dan uji petik yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan perbaikan dalam penerapan SNI. Sehingga diharapkan dapat memperkuat kapasitas dan kualitas penerapan standar, yang pada akhirnya akan berdampak kepada semakin bertambahnya pelaku usaha yang menerapkan SNI dan terciptanya perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup bagi masyarakat.

SASARAN 4 **Meningkatnya kualitas pelayanan SPPT SNI**

Sasaran keempat adalah tersedianya Meningkatnya kualitas pelayanan SPPT SNI. Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran ke-4, Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan SPPT SNI. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut melebihi 100 %. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 4.

Tabel III.24
Capaian Kinerja Sasaran 4

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2022			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
			Target	Realisasi	%*	Target	% capaian
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan SPPT SNI	Indeks	3,4	3,3	3,6	110%	3.5	102%

Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2014 pasal 46 ayat 3 yang menyatakan bahwa persetujuan penggunaan tanda SNI diberikan oleh BSN kepada pelaku usaha, PP Nomor 34 tahun 2018 terkait dengan pembubuhan tanda SNI serta dasar penerbitan persetujuan penggunaan tanda SNI, maka Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dalam hal ini Subdirektorat Pengendalian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai tugas untuk memproses Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI yang akan diberikan kepada pelaku usaha yang sudah melalui proses sertifikasi dan dinyatakan sudah memenuhi oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN.

Proses penerbitan SPPT SNI ini dilakukan secara *online* dengan menggunakan aplikasi barang berSNI atau yang disebut *bangbeni.bsn.go.id*. Dalam proses SPPT SNI, pedoman yang digunakan adalah Peraturan Kepala BSN nomor 2 tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. Selama tahun 2022, BSN telah menerbitkan sebanyak 500 SPPT SNI dengan berbagai macam jenis produk. Jumlah SPPT SNI yang diterbitkan setiap bulan selama tahun 2022 dapat dilihat pada gambar III.14.



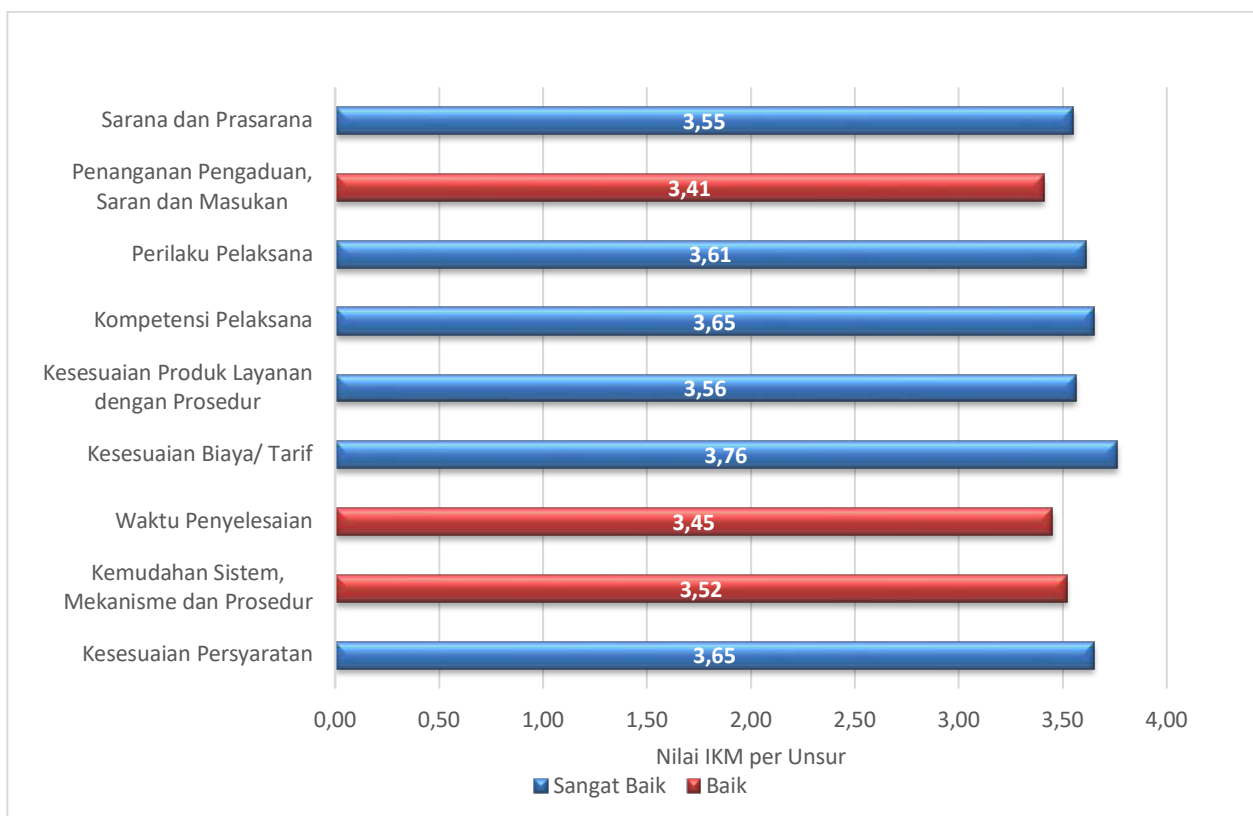
Gambar III.14 Grafik Jumlah SPPT SNI Tahun 2022

Dalam melakukan pelayanan ini, Subdirektorat Pengendalian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian juga melakukan survei kesemua pelanggan dan penerima layanan SPPT SNI. Survei dilaksanakan setiap akhir tahun terhadap beberapa kategori yaitu:

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/ Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan analisa dan pengolahan data hasil survei pelayanan yang diberikan Subdirektorat Pengendalian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian diperoleh nilai 3,6 dimana nilai ini masuk kepada kategori sangat baik. Hal ini melebihi target yang diharapkan yaitu 3,3, sehingga seluruh capaian di tahun 2022 untuk Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan SPPT SNI 100% terpenuhi. Hasil survei secara lengkap dapat dilihat pada gambar III.15



Gambar III.15 Hasil survei Layanan SPPT SNI Tahun 2022

Dari hasil survei layanan SPPT SNI tahun 2022, dapat dilihat bahwa nilai terendah ada pada unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan. Hal ini sudah ditindak lanjuti dengan memberikan tambahan fitur pada aplikasi penerbitan SPPT SNI (bangbeni.bsn.go.id) yaitu "pengaduan masyarakat". Fitur ini tersambung langsung dengan link lapor.bsn.go.id. Link tersebut menjadi fitur 1 pintu yang terhubung dengan unit teknis terkait dalam penyelesaian pengaduannya. Selain penambahan fitur tersebut, pengembangan aplikasi bangbeni juga dilakukan untuk beberapa skema selain produk, yaitu untuk skema sertifikasi LSPPIU, LSISPO, LSSM, LSSML, LSSMKP, LSSHACCP, LSSMKI, LSSMAP, LSSMBL, LSSMK3, LSSMOP, LSE, LSO. Kemudian, pengembangan pada lingkup Lembaga inspeksi, laboratorium pengujian, Lembaga verifikasi dan validasi, Lembaga verifikasi legalitas kayu serta LPPHPL. Sehingga untuk LPK yang memiliki skema tersebut dapat mulai menginput seluruh data hasil sertifikasi dan penilaian kesesuaian didalam aplikasi bangbeni. Pengembangan ini disosialisasikan pada saat kegiatan *World Accreditation Day* pada tanggal 16 Juni 2022 dengan dihadiri oleh seluruh LPK.

Selain pengembangan proses penginputan diluar produk, dikembangkan pula penerbitan SPPT SNI khusus untuk lingkup CHSE. Proses pengembangan ini dilakukan secara intensif melalui rapat koordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar proses penerbitan SPPT SNI bisa efektif dan efisien. Sosialisasi proses penerbitan SPPT SNI untuk lingkup CHSE juga sudah dilakukan ke seluruh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN untuk lingkup tersebut.

Upaya perbaikan kedepan yang perlu dilakukan agar kualitas pelayanan SPPT SNI lebih meningkat, antara lain: meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta stakeholders terkait, pengelolaan yang lebih baik terhadap aplikasi penerbitan SPPT SNI, serta sosialisasi proses penerbitan SPPT SNI untuk lingkup atau sektor lainnya yang terkait.

III.2 CAPAIAN KEGIATAN

Pencapaian kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian tidak lepas dari capaian Rincian Output (RO) di Unit Kerja. Adapun realisasi dari RO disampaikan pada Tabel III.25. Realisasi dari kegiatan (RO) rata-rata mencapai nilai 100%.

Tabel III.25
Capaian Rincian Output (RO) Direktorat Sistem Penerapan STA. 2022

Kode	Kegiatan/KRO/RO	2022		%
		Target	Realisasi	
3561	Kegiatan Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian/ Unit kerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian			
3561 ABK	KRO-Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM			
3561.ABK.001	Skema Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	30 Rekomendasi kebijakan	48 Rekomendasi kebijakan	160%
3561.ABK.002	Harmonisasi Regulasi berbasis SPK	19 Rekomendasi kebijakan	20 Rekomendasi kebijakan	105%
3561.ABK.003	Pengendalian Penerapan SPK	21 Rekomendasi kebijakan	23 Rekomendasi kebijakan	109%
3561 AEB	KRO-Forum			
3561.AEB.001	Sidang Komite TBT-WTO	1 forum	1 forum	100%
3561. ABB	KRO-Konferensi dan Event			
3561.ABB.001	Kebijakan Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan	3 Rekomendasi kebijakan	3 Rekomendasi kebijakan	100%
3561.ABB.002	Perundingan Regional Bidang SPK	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100%

Kode	Kegiatan/KRO/RO	2022		%
		Target	Realisasi	
		kebijakan	kebijakan	
3561.ABB.003	Implementasi Kesepakatan Internasional	1 Rekomendasi kebijakan	1 Rekomendasi kebijakan	100%
3561.ABB.004	Perundingan Bilateral	4 Rekomendasi kebijakan	4 Rekomendasi kebijakan	100%
3561.FAI	KRO-Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan			
3561.FAI.001	Tata Kelola SPK pada Organisasi Pemerintah	10 Lembaga	15 Lembaga	150%
3561.BAH	KRO-Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan			
3561.BAH.001	Layanan SPPT SNI	75 Layanan (laporan)	80 Layanan (laporan)	107%

III.3 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA induk BSN Nomor SP DIPA-084.01-0/2021 tanggal 23 November 2022, Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mengelola pagu awal sebesar Rp. 2.241.105.000,- dan pagu telah direvisi sampai di akhir tahun 2022 menjadi Rp. 1.855.318.000,- dengan realisasi sebesar 1.850.106.155,- atau mencapai 99,72%.

Pagu dan realisasi anggaran Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian TA. 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.26

Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian TA. 2022

Dalam rupiah

Kode	Kegiatan/KRO/RO	2022		%
		Pagu Stlh Blokir AA	Realisasi	
3561	Kegiatan Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian/ Unit kerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	1.855.318.000	1.850.106.155	99,72
3561 ABK	KRO-Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	1.211.984.000	1.211.511.638	99,96
3561.ABK.001	Skema Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	519.847.000	519.694.517	99,97

Kode	Kegiatan/KRO/RO	2022		%
		Pagu Sthl Blokir AA	Realisasi	
3561.ABK.002	Harmonisasi Regulasi berbasis SPK	128.230.00	128.044.936	99,86
3561.ABK.003	Pengendalian Penerapan SPK	563.907.000	563.772.185	99,98
3561 AEB	KRO-Forum	29.802.000	29.727.294	99,75
3561.AEB.001	Sidang Komite TBT-WTO	185.877.000	29.727.294	99,75
3561. ABB	KRO-Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	396.967.000	392.323,287	98,83
3561.ABB.001	Kebijakan Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan	97.392.000	97.294.610	99,90
3561.ABB.002	Perundingan Regional Bidang SPK	81.004.000	80.092.227	98,87
3561.ABB.003	Implementasi Kesepakatan Internasional	159.433.000	156.947.731	98,44
3561.ABB.004	Perundingan Bilateral	59.138.000	57.988.719	98,06
3561.FAI	KRO-Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	108.091.000	39.014.200	99,99
3561.FAI.001	Tata Kelola SPK pada Organisasi Pemerintah	108.091.000	108.085,800	99,99
3561.BAH	KRO-Pelayanan Publik Lainnya	108.474.000	108.458.136	99,99
3561.BAH.001	Layanan SPPT SNI	108.474.000	108.458.136	99,99
3561	Jumlah	1.855.318.000	1.850.106.155	99,72

Analisis Sumber Daya

Dengan keterbatasan sumber daya, maka pada tahun 2022 Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah melakukan efisiensi sumber daya antara lain:

1. Efisiensi dalam melakukan kegiatan rapat, seperti pembahasan skema, fasilitasi penyusunan regulasi teknis, evaluasi tata Kelola SPK dan rapat pembahasan lainnya dilakukan dengan teleworking, memanfaatkan teknologi informasi dengan online meeting, sehingga mengurangi biaya bahan, belanja perjalanan, biaya akomodasi dan belanja narasumber,
2. Efisiensi dalam menghadiri sidang dan pertemuan internasional, serta melakukan rapat kegiatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan kegiatan sosialisasi secara hybrid sehingga mengurangi biaya belanja bahan, belanja perjalanan dan belanja narasumber,
3. Melakukan peningkatan layanan berbasis digital sebagai contoh peningkatan layanan SPPT SNI dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Laporan Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022, seluruh kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2020 dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 100%. Pencapaian terhadap sasaran strategis tersebut menunjukkan bahwa Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah memberikan kontribusi dalam melaksanakan pengembangan dan pembinaan standardisasi di Indonesia sesuai amanah yang diberikan. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta peningkatan pemanfaatan kebijakan dan skema penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan; peningkatan jumlah penerapan SNI oleh organisasi secara konsisten; serta peningkatan penerapan SNI.

Sebagai tindak lanjut atas penilaian MenPANRB atas beberapa sasaran kinerja yang belum didukung indikator kinerja yang terukur, relevan dan cukup untuk mengukur pencapaian kinerja yang ingin diwujudkan, maka telah dilakukan reviu atas Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan BSN dan perubahannya telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Laporan Kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2022 ini diharapkan dapat memenuhi akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian di masa mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih optimal.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian



Alamat: Gedung I BPPT Jl. M.H. Thamrin No.8, Kebon Sirih, Jakarta 10340
Telp/Fax: (021) 3927422 / (021) 3927527 Website: www.bsn.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT SISTEM PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatnya kualitas Rekomendasi Kebijakan SPK dalam memfasilitasi penerapan SNI dan Penilaian Kesesuaian	1 Persentase rekomendasi kebijakan penerapan SPK yang ditindaklanjuti stakeholder	86 %
2 Meningkatnya Jumlah organisasi pemerintah yang menerapkan tata kelola SPK	2 Persentase instansi pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2	50 %
3 Meningkatnya produk bertanda SNI yang beredar terhadap persyaratan SNI yang ditetapkan	3 Persentase produk bertanda SNI (yang dimonitor) yang memenuhi persyaratan SNI	60 %
4 Meningkatnya kualitas pelayanan SPPT SNI	4 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan SPPT SNI	3,3 nilai
5 Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran	5 Persentase realisasi anggaran Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	>97 %

Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1 Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	2.191.105.000

Pihak Kedua

Zakiyah

Jakarta, 28 Desember 2021
Pihak Pertama

Konny Sagala

LAMPIRAN II

Data Masa Transisi SNI Revisi Tahun 2022

No	SNI Baru	SNI lama	No SK	Status Masa Transisi
1	SNI ISO 11737-2:2019 STERILISASI PRODUK PELAYANAN KESEHATAN – METODE MIKROBIOLOGI - BAGIAN 2: DEFINISI, VALIDASI DAN MEMPERTAHANKAN PROSES STERILISASI UNTUK UJI STERILITAS	SNI ISO 11737-2:2017 STERILISASI ALAT KESEHATAN – METODE MIKROBIOLOGI – BAGIAN 2: UJI STERILITAS YANG DILAKUKAN DALAM VALIDASI PROSES STERILISASI	26/KEP/BSN/2/2022	Pencabutan SNI lama
2	SNI ISO 11737-1:2018 STERILISASI PRODUK PELAYANAN KESEHATAN – METODE MIKROBIOLOGI - BAGIAN 1: PENENTUAN POPULASI MIKROORGANISME PADA PRODUK	SNI ISO 11737-1:2017 STERILISASI ALAT KESEHATAN – METODE MIKROBIOLOGI – BAGIAN 1: PENENTUAN DARI POPULASI MIKROORGANISME PADA PRODUK	26/KEP/BSN/2/2022	Pencabutan SNI lama
3	SNI 2856:2021 KAPORIT (KALSIUM HIPOKLORIT)	SNI 06-2856-1998 KAPORIT (KALSIUM HIPOKLORIT)	19/KEP/BSN/2/2022	30 Juni 2024
4	SNI ISO 5398-3: 2018 KULIT – PENENTUAN KIMIAWI KADAR KROM OKSIDA – BAGIAN 3: KUANTIFIKASI DENGAN CARA SPEKTROMETRI SERAPAN ATOM	SNI ISO 5398-3: 2013 KULIT – PENENTUAN KIMIAWI KADAR KROM OKSIDA - BAGIAN 3: KUANTIFIKASI DENGAN SPEKTROMETRI SERAPAN ATOM	19/KEP/BSN/2/2022	30 Juni 2023
5	SNI ISO 5398-1: 2018 KULIT – PENENTUAN KIMIAWI KADAR KROM OKSIDA – BAGIAN 1: KUANTIFIKASI DENGAN CARA TITRASI	SNI ISO 5398-1: 2013 KULIT – PENENTUAN KIMIAWI KADAR KROM OKSIDA – BAGIAN 1: KUANTIFIKASI DENGAN CARA TITRASI DAN SNI 06-0645-1989 KULIT TERSAMAK, CARA UJI KADAR KROM OKSIDA	19/KEP/BSN/2/2022	30 Juni 2023
6	SNI 7188-1-3:2021 KRITERIA EKOLABEL – BAGIAN 1: KATEGORI PRODUK KERTAS – SEKSI 3: KERTAS CETAK DAN KERTAS MULTIGUNA	SNI 7188.1.3-2016 KRITERIA EKOLABEL - BAGIAN 1: KATEGORI PRODUK KERTAS - SEKSI 3: KERTAS CETAK TANPA SALUT DAN KERTAS MULTIGUNA	19/KEP/BSN/2/2022	30 Juni 2023
7	SNI 8403:2021 KERTAS KONTINU	SNI 8403:2017 KERTAS KOMPUTER KONTINU	19/KEP/BSN/2/2022	30 Juni 2023

No	SNI Baru	SNI lama	No SK	Status Masa Transisi
8	SNI 8995:2021 METODE PENGAMBILAN CONTOH UJI AIR UNTUK PENGUJIAN FISIKA DAN KIMIA	SNI 06-6989.57:2008 AIR DAN AIR LIMBAH – BAGIAN 57: METODE PENGAMBILAN CONTOH AIR PERMUKAAN DAN SNI 06-6989.58:2008 AIR DAN AIR LIMBAH – BAGIAN 58: METODE PENGAMBILAN CONTOH AIR TANAH	230/KEP/BSN/7/2022	30 Juni 2023
9	SNI ISO 7405:2018 KEDOKTERAN GIGI - EVALUASI BIODOKTERAN ALAT KESEHATAN YANG DIGUNAKAN DI BIDANG KEDOKTERAN GIGI	SNI ISO/TS 22911:2016 KEDOKTERAN GIGI - EVALUASI PREKLINIK DARI SISTEM IMPLAN GIGI - METODE UJI HEWAN	26/KEP/BSN/2/2022	Pencabutan SNI lama
10	SNI ISO 4049:2019 KEDOKTERAN GIGI - MATERIAL RESTORASI BERBASIS POLIMER	SNI ISO 4049:2009 KEDOKTERAN GIGI - MATERIAL RESTORASI BERBASIS POLIMER	26/KEP/BSN/2/2022	Pencabutan SNI lama
11	SNI 7186:2021 PENGUKURAN DAN EVALUASI PAPARAN GETARAN PADA SELURUH TUBUH PEKERJA	SNI 7186:2009 METODE PENGUKURAN PERCEPATAN GETARAN SELURUH TUBUH PADA SIKAP KERJA DUDUK	27/KEP/BSN/2/2022	31 Desember 2023
12	SNI IEC 62244:2019 INSTRUMENTASI PROTEKSI RADIASI -PORTAL MONITOR RADIASI (PMR) TERPASANG UNTUK DETEKSI PERPINDAHAN TIDAK SAH BAHAN NUKLIR DAN RADIOAKTIF	IEC 62244:2016 INSTRUMENTASI PROTEKSI RADIASI -MONITOR RADIASI YANG TERPASANG UNTUK DETEKSI BAHAN NUKLIR KHUSUS DAN RADIOAKTIF D1 PERBATASAN WILAYAH	27/KEP/BSN/2/2022	31 Desember 2022
13	SNI 6372:2021 STANDAR UNTUK PENGONDISIAN KELEMBAPAN KAYU DAN BAHAN BERBASIS KAYU	SNI 03-6372-2000 TATA CARA PENGONDISIAN KELEMBAPAN KAYU DAN BAHAN BERKAYU		Pencabutan SNI lama
14	SNI 6850:2021 METODE UJI UNTUK PENGUKURAN KADAR AIR LANGSUNG DARI KAYU DAN BAHAN BERBASIS KAYU	SNI 03-6850-2000 METODE PENGUJIAN PENGUKURAN KADAR AIR KAYU DAN BAHAN BERKAYU		Pencabutan SNI lama
15	SNI ISO 5894:20:8 TEKNOLOGI KAPAL DAN KELAUTAN -LUBANG LALU ORANG DENGAN TUTUP BERBAUT	SNI ISO 5894:2011 TEKNOLOGI KAPAL DAN KELAUTAN - LUBANG LALU ORANG DENGAN TUTUP BERBAUT	27/KEP/BSN/2/2022	31 Desember 2022
16	SNI 9009:2021 KOMPONEN PERALATAN PERANGKAI MEKANIKA SARANA PERKERETA APIAN	SNI 11-1649-1989 ALAT PERANGKAI OTOMATIS UNTUK KERETA DAN SNI 11-1648-1989 ALAT PERANGKAI OTOMATIS UNTUK GERBONG		Disepakati untuk abolisi berdasarkan rapat kaji ulang tgl 17

No	SNI Baru	SNI lama	No SK	Status Masa Transisi
				Sept 2021 dan menjadi tanggung jawab Dit. MEETTI
17	SNI IEC 31010:2019 MANAJEMEN RISIKO — TEKNIK PENILAIAN RISIKO	SNI IEC/ISO 31010:2016 MANAJEMEN RISIKO — TEKNIK PENILAIAN RISIKO	228/KEP/BSN/7/2022	Pencabutan SNI lama
18	SNI 1439:2021 KARTON GELOMBANG UNTUK KOTAK KARTON GELOMBANG	SNI 1439:2010 KARTON GELOMBANG DAN KOTAK KARTON GELOMBANG	19/KEP/BSN/2/2022	30 Juni 2023
19	SNI 6021:2021 KERTAS GLASIN	SNI 6021:2009 KERTAS GLASIN	19/KEP/BSN/2/2022	30 Juni 2023
20	SNI ISO 19110:2016 INFORMASI GEOGRAFIS- METODOLOGI PENYUSUNAN KATALOG UNSUR GEOGRAFI	SNI ISO 19110:2015 INFORMASI GEOGRAFIS- METODOLOGI PENYUSUNAN KATALOG UNSUR GEOGRAFI	230/KEP/BSN/7/2022	30 Juni 2024
21	SNI ISO 3175-2:2017 TEKSTIL - PEMELIHARAAN PROFESIONAL, CUCI KERING DAN CUCI BASAH KAIN DAN CARMEN -BAGIAN 2: PROSEDUR PENGUJIAN PERFORMA SAAT PENCUCIAN DAN PENYEMPURNAAN MENGGUNAKAN TETRAKLOOROETANA	SNI ISO 3175-2:2015 TEKSTIL- PEMELIHARAAN PROFESIONAL, CUCI KERING DAN CUCI BASAH DARI KAIN DANGARMEN - BAGIAN 2: PROSEDUR PENGUJIAN PERFORMA SAAT PENCUCIAN DAN PENYEMPURNAAN MENGGUNAKAN TETRAKLOOROETANA	19/KEP/BSN/2/2022	31 Desember 2022
22	SNI 7277-14:2021 ISTILAH DAN DEFINISI - BAGIAN 14:KESELAMATAN UNTUK KAPAL PENANGKAP IKAN	SNI 7277.14:2008 ISTILAH DAN DEFINISI - BAGIAN 14: KESELAMATAN KAPAL PERIKANAN	85/KEP/BSN/4/2022	Pencabutan SNI Lama
23	SNI 9025:2021 PENANGANAN IKAN - PEMBONGKARAN IKAN SEGAR DAN IKAN BEKU DARI KAPAL PERIKANAN DI PELABUHAN	SNI 8088:2014 PENANGANAN IKAN - PEMBONGKARAN IKAN SEGAR DARI KAPAL PERIKANAN DI PELABUHAN DAN SNI 8089:2014 PENANGANAN IKAN - PEMBONGKARAN IKAN BEKUDARI KAPAL PERIKANAN DI PELABUHAN	85/KEP/BSN/4/2022	Pencabutan SNI Lama
24	SNI 8087:2021 PENANGANAN IKAN - CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK DI ATAS KAPAL PERIKANAN	SNI 8087:2014 PENANGANAN IKAN - CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK DI ATAS KAPAL	85/KEP/BSN/4/2022	Pencabutan SNI Lama
25	SNI 440:2021 KERTAS DAN KARTON - GRAMATUR	SNI 0440:2006 GRAMATUR KERTAS DAN KARTON	19/KEP/BSN/2/2022	31 Desember 2023
26	SNI 581:2021 KLASIFIKASI PULP, KERTAS DAN KARTON	SNI 0581:2012 KLASIFIKASI PULP, KERTAS DAN KARTON	19/KEP/BSN/2/2022	31 Desember 2022

No	SNI Baru	SNI lama	No SK	Status Masa Transisi
27	SNI 1303:2021 CARA UJI HOLOSELULOSA DALAM KAYU	SNI 01-1303-1989 CARA UJI KADAR HOLOSELULOSA	19/KEP/BSN/2/2022	31 Desember 2022
28	SNI 410:2021 CARA UJI LENGKUNG LOGAM	SNI 0410:2017 CARA UJI LENGKUNG LOGAM	230/KEP/BSN/7/2022	30 Juni 2023
29	SNI ISO 3175-1:2017 TEKSTIL - PEMELIHARAAN PROFESIONAL, CUCI KERING DAN CUCI BASAH KAIN DAN GARMEN - BAGIAN 1: PENILAIAN PERFORMA SETELAH PENCUCIAN DAN PENYEMPURNAAN	SNI ISO 3175-1:2011 TEKSTIL - PEMELIHARAAN PROFESIONAL. CUCI KERING DAN CUCI BASAH DARI KAIN DAN GARMEN - BAGIAN 1: PENILAIAN PERFORMA SETELAH PENCUCIAN DAN PENYEMPURNAAN	90/KEP/BSN/4/2022	31 Desember 2022
30	SNI ISO 13935-1:2014 TEKSTIL - SIFAT KEKUATAN JAHITAN PADA KAIN DAN PRODUK TEKSTIL - BAGIAN 1: PENENTUAN KEKUATAN MAKSIMUM PUTUS JAHITAN MENGGUNAKAN METODE PITA	SNI ISO 13935-1:2012 TEKSTIL - KAIN DAN PRODUK TEKSTIL - CARA UJI KEKUATAN JAHITAN - BAGIAN 1: METODE PITA	90/KEP/BSN/4/2022	30 Juni 2023
31	SNI ISO 3071:2020 TEKSTIL - CARA UJI PH EKSTRAK CAIRAN	SNI ISO 3071:2015 TEKSTIL - CARA UJI PH EKSTRAK CAIRAN	90/KEP/BSN/4/2022	30 Juni 2023
32	SNI ISO 7211-5:2020 TEKSTIL - METODE ANALISIS KONSTRUKSI ICAIN TENUN - BAGIAN 5: CARA UJI NOMOR BENANG YANG DIAMBIL DARI KAIN	SNI ISO 7211-5:2017 TEKSTIL - KAIN TENUN - METODA ANALISA - BAGIAN 5: CARA UJI NOMOR BENANG YANG DIAMBIL DARI KAIN	90/KEP/BSN/4/2022	31 Desember 2023
33	SNI ISO 811:2018 TEKSTIL - CARA UJI KETAHANAN PEREMBESAN AIR - UJI TEKANAN HIDROSTATIK	SNI ISO 811:2013 TEKSTIL - KAIN - CARA UJI KETAHANAN PEREMBESAN AIR - UJI TEKANAN HIDROSTATIK	90/KEP/BSN/4/2022	30 Juni 2023
34	SNI 2156:2021 SPESIFIKASI BETON AERASI AUTOKLAF	SNI 03-2156-1991 BLOK BETON RINGAN BERGELEMBUNG UDARA (AIRATED) DENGAN PROSES OTOKLAP		30 Juni 2024
35	SNI 2694:2021 SURIMI BEKU	SNI 2694:2013 SURIMI	84/KEP/BSN/4/2022	31 Desember 2024
36	SNI 3457:2021 UDANG KUPAS MENTAH BEKU	SNI 3457:2014 UDANG KUPAS MENTAH BEKU	85/KEP/BSN/4/2022	Pencabutan SNI Lama
37	SNI 2372-2:2021 CARA UJI FISIKA - BAGIAN 2: PENENTUAN BERAT BERSIH DAN BERAT TUNTAS PADA HASIL PERIKANAN BEKU	SNI 2372.2:2011 CARA UJI FISIKA - BAGIAN 2: PENENTUAN BOBOT TUNTAS PADA PRODUK PERIKANAN	84/KEP/BSN/4/2022	30 Juni 2024
38	SNI 2729:2021 IKAN SEGAR	SNI 2729:2013 IKAN SEGAR	84/KEP/BSN/4/2022	31 Desember 2024

No	SNI Baru	SNI lama	No SK	Status Masa Transisi
39	SNI 4224:2021 DAGING RAJUNGAN MASAK DINGIN	SNI 4224:2015 DAGING RAJUNGAN REBUS DINGIN	85/KEP/BSN/4/2022	Pencabutan SNI Lama
40	SNI 2332-6:2021 CARA UJI MIKROBIOLOGI - BAGIAN 6: PENENTUAN PARASIT PADA HASIL PERIKANAN	SNI 2332.6:2015 CARA UJI MIKROBIOLOGI - BAGIAN 6: PENENTUAN PARASIT CACING PADA PRODUK PERIKANAN	84/KEP/BSN/4/2022	31 Desember 2024
41	SNI 8263:2021 IKAN HIAS RASBORA {RASBORA SPP.} - SYARAT MUTU DAN PENANGANAN	SNI 8263:2016 IKAN HIAS RASBORA [RASBORA SPP.] - SYARAT MUTU DAN PENANGANAN	85/KEP/BSN/4/2022	Pencabutan SNI Lama
42	SNI 7948:2021 KITIN - SYARAT MUTU DAN PENGOLAHAN	SNI 7948:2013 KITIN - SYARAT MUTU DAN PENGOLAHAN	84/KEP/BSN/4/2022	30 Juni 2024
43	SNI 7795:2021 ALAT PENANGKAPAN IKAN - JALA JATUH BERKAPAL	SNI 7795:2013 ALAT PENANGKAPAN IKAN - JALA JATUH CUMI (STICK HELD CAST NET)	85/KEP/BSN/4/2022	Pencabutan SNI lama
44	SNI 7796:2021 ALAT PENANGKAPAN IKAN - BOUKE AMI PADA KAPAL 10 GT - 30 GT	SNI 7796:2013 ALAT PENANGKAPAN IKAN - BOUKE AMI PADA KAPAL 10 GT - 30 GT	85/KEP/BSN/4/2022	Pencabutan SNI lama
45	SNI 9026:2021 KAPAL PERIKANAN - PALKA IKAN SEGAR DAN IKAN BEKU PADA KAPAL PENANGKAP IKAN	SNI 8090:2014 PENANGANAN IKAN DI ATAS KAPAL - FASILITAS PALKA IKAN SEGAR DAN SNI 8091:2014 PENANGANAN IKAN DI ATAS KAPAL - FASILITAS PALKA IKAN BEKU	85/KEP/BSN/4/2022	Pencabutan SNI lama
46	SNI 680:2021 KLOSET JONGKOK KERAMIK	SNI 03-0680-1998 TANDAS JONGKOK JENIS VITORUS CINA	230/KEP/BSN/7/2022	30 Juni 2024
47	SNI 2802:2021 TEPUNG AGAR-AGAR MURNI	SNI 2802:2015 AGAR-AGAR TEPUNG	84/KEP/BSN/4/2022	31 Desember 2024
48	SNI 8391-1:2021 KARAGINAN MURNI - BAGIAN 1: KAPPA (K) KARAGINAN MURNI METODE PENJENDALAN KCL - SYARAT MUTU DAN PENGOLAHAN	SNI 8391-1:2017 KARAGINAN MURNI (REFINED CARRAGEENAN) - BAGIAN 1: KAPPA KARAGINAN - SYARAT MUTU DAN PENGOLAHAN	84/KEP/BSN/4/2022	30 Juni 2024
49	SNI 180-1:2022 ALAT PEMADAM API PORTABEL (APAP) - BAGIAN 1: SYARAT MUTU	SNI 180:2021 ALAT PEMADAM API PORTABEL (APAP) DAN SNI 03-3988-1995 PENGUJIAN KEMAMPUAN PEMADAMAN DAN PENILAIAN ALAT PEMADAM API RINGAN		Akan dikonfirmasi kembali pada tgl 11 April 2022 ke lab uji BBLM

No	SNI Baru	SNI lama	No SK	Status Masa Transisi
50	SNI IEC 62321-1:2013 PENENTUAN BAHAN TERTENTU ZAT DALAM PRODUK ELEKTROTEKNIK - BAGIAN 1: PENDAHULUAN DAN IKHTISAR	SNI IEC 62321:2015 PRODUK ELEKTROTEKNIK - PENENTUAN KADAR ENAM UNSUR YANG DIREGULASI (TIMBAL, AIR RAKSA, KADMIUM, KROMIUM HEKSAVALEN, BIFENIL POLIBROMINAT, ETER DIFENIL POLIBROMINAT)	230/KEP/BSN/7/2022	30 Juni 2024
51	SNI 2156:2021 SPESIFIKASI BETON AERASI AUTOKLAF	SNI 03-2156-1991 BLOK BETON RINGAN BERGELEMBUNG UDARA (AIRATED) DENGAN PROSES OTOKLAP	230/KEP/BSN/7/2022	30 Juni 2024
52	SNI 7700-5:2021 PAKAN BIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM RAS TIPE PETELUR - BAGIAN 5: MASA BERTELUR (LAYER)	SNI 7700.5:2011 PAKAN BIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM RAS TIPE PETELUR - BAGIAN 5: LAYER	90/KEP/BSN/4/2022	31 Desember 2025
53	SNI 7700-3:2021 PAKAN BIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM RAS TIPE PETELUR - BAGIAN 3: GROWLER	SNI 7700.3:2011 PAKAN BIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM RAS TIPE PETELUR - BAGIAN 3: PULLET	90/KEP/BSN/4/2022	31 Desember 2025
54	SNI 7700-1:2021 PAKAN DIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM RAS TIPE PETELUR - BAGIAN 1: PRESTARTER	SNI 7700.1:2011 PAKAN DIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM F5AS TIPE PETELUR - BAGIAN 1: STARTER	90/KEP/BSN/4/2022	31 Desember 2025
55	SNI 7700-6:2021 PAKAN BIBIT INDUK [PARENT STOCK] AYAM RAS TIPE PETELUR - BAGIAN 6: JANTAN	SNI 7700.6:2011 PAKAN BIBIT INDUK [PARENT STOCK] AYAM RAS TIPE PETELUR - BAGIAN 6: JANTAN	90/KEP/BSN/4/2022	31 Desember 2025
56	SNI 7700-4:2021 PAKAN BIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM RAS TIPE PETELUR - BAGIAN 4: PRELAYER	SNI 7700.4:2011 PAKAN BIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM RAS TIPE PETELUR - BAGIAN 4: PRALAYER	90/KEP/BSN/4/2022	31 Desember 2025
57	SNI 7700-2:2021 PAKAN BIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM HAS TIPE PETELUR - BAGIAN 2: STARTER	SNI 7700.2:2011 PAKAN BIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM RAS TIPE PETELUR - BAGIAN 2: GROWER	90/KEP/BSN/4/2022	31 Desember 2025
58	SNI 7652-6:2021 PAKAN BIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM RAS TIPE PEDAGING - BAGIAN 6: JANTAN	SNI 7652.6:2011 PAKAN BIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM RAS TIPE PEDAGING - BAGIAN 6: JANTAN	90/KEP/BSN/4/2022	31 Desember 2025
59	SNI 7652-5:2021 PAKAN BIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM RAS TIPE PEDAGING - BAGIAN 5: MASA BERTELUR (LAYER)	SNI 7652.5:2011 PAKAN BIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM RAS TIPE PEDAGING - BAGIAN 5: LAYER	90/KEP/BSN/4/2022	31 Desember 2025
60	SNI 7652-4:2021 PAKAN BIBIT INDUK (PARENT STOCK) AYAM RAS TIPE PEDAGING - BAGIAN 4: PRELAYER	SNI 7652.4:2011 PAKAN BIBIT INDUK [PARENT STOCK] AYAM RAS TIPE PEDAGING - BAGIAN 4: PRELAYER	90/KEP/BSN/4/2022	31 Desember 2025

No	SNI Baru	SNI lama	No SK	Status Masa Transisi
61	SNI 3907:2021 PAKAN PUYUH BERTELUR (QUAIL LAYER)	SNI 01- 3907-2006 PAKAN PUYUH BERTELUR (QUAIL LAYER)	90/KEP/BSN/4/2022	31 Desember 2025
62	SNI 3906:2021 PAKAN PUYUH DARA (QUAIL GROWER)	SNI 01- 3906-2006 PAKAN PUYUH DARA (QUAIL GROWER)	90/KEP/BSN/4/2022	31 Desember 2025
63	SNI 3905:2021 PAKAN ANAK PUYUH (QUAIL STARTER)	SNI 01-3905-2006 PAKAN ANAK PUYUH (QUAIL STARTER)	90/KEP/BSN/4/2022	31 Desember 2025
64	SNI 665:2021 Sabit - Syarat mutu dan metode uji	SNI 02-0665-1989 Sabit/arit	130/KEP/BSN/5/2022	30 Juni 2023
65	SNI 6349:2021 Tata cara penentuan ketebalan tanah zona perakaran prapenambangan	SNI 13-6349-2000 Penentuan ketebalan zona pengakaran pra-penambangan	230/KEP/BSN/7/2022	31 Desember 2023
66	SNI 7742:2021 Pengelolaan air asam tambang	SNI 7742:2011 Pengelolaan air asam tambang	230/KEP/BSN/7/2022	31 Desember 2023
67	SNI 6250:2021 Tata cara penentuan kualitas tanah untuk revegetasi di lahan terganggu pada kegiatan pertambangan	SNI 03-6250-2000 Tata cara penentuan kualitas tanah pada lahan bekas tambang untuk revegetasi	230/KEP/BSN/7/2022	31 Desember 2023
68	SNI 6597:2021 Uji karakterisasi batuan untuk penentuan potensi pembentukan air asam tambang	SNI 6597:2011 Uji statik pengidentifikasian sumber air asam tambang	230/KEP/BSN/7/2022	31 Desember 2023
69	SNI ISO 6710:2017 Wadah sekali pakai untuk penampungan spesimen darah vena manusia (ISO 6710:2017, IDT)	SNI ISO 6710:2010 Wadah sekali pakai penampung spesimen darah vena	130/KEP/BSN/5/2022	31 Desember 2022
70	SNI ISO 7886-1:2017 Alat suntik hipodermik steril sekali pakai – Bagian 1: Alat suntik untuk penggunaan manual (ISO 7886-1:2017, IDT)	SNI 16-7010.1-2004 Alat suntik hipodermik steril sekali pakai - Bagian 1: Untuk penggunaan manual	130/KEP/BSN/5/2022	31 Desember 2022
71	SNI ISO 8669-2:1996 Kantong penampung urin – Bagian 2: Persyaratan dan metode uji (ISO 8669-2:1996, IDT)	SNI 16-6359-2000 Kantong penampung urine - Persyaratan dan metode uji		Pencabutan SNI Lama
72	SNI ISO 7886-4:2018 Alat suntik hipodermik steril sekali pakai – Bagian 4: Alat suntik dengan fitur pencegahan penggunaan ulang (ISO 7886-4:2018, IDT)	SNI ISO 7886-4:2009 Alat suntik hipodermik steril sekali pakai - Bagian 4: Alat suntik dengan fitur pencegahan ulang	130/KEP/BSN/5/2022	31 Desember 2022
73	SNI ISO 10555-5:2013 Kateter intravaskular – Kateter steril dan sekali pakai – Bagian 5: Kateter perifer	SNI ISO 10555-5:2010 Kateter intravaskular sekali pakai, steril - Bagian 5: Kateter perifer over-needle	130/KEP/BSN/5/2022	31 Desember 2022

No	SNI Baru	SNI lama	No SK	Status Masa Transisi
	over-needle (ISO 10555-5:2013, IDT)			
74	SNI ISO 15747:2018 Wadah plastik untuk injeksi intravena (ISO 15747:2018, IDT)	SNI ISO 15747:2012 Wadah plastik untuk injeksi intravena	130/KEP/BSN/5/2022	31 Desember 2022
75	SNI ISO 23500-3:2019 Penyiapan dan manajemen mutu cairan untuk hemodialisis dan terapi terkait — Bagian 3: Air untuk hemodialisis dan terapi terkait (ISO 23500-3:2019, IDT)	SNI ISO 13959:2010 Air untuk hemodialisis dan terapi sejenis	130/KEP/BSN/5/2022	31 Desember 2022
76	SNI ISO 23500-5:2019 Penyiapan dan manajemen mutu cairan untuk hemodialisis dan terapi terkait — Bagian 5: Mutu cairan dialisis untuk hemodialisis dan terapi terkait (ISO 23500-5:2019, IDT)	SNI ISO 11663:2011 Air untuk hemodialisis dan terapi sejenis	130/KEP/BSN/5/2022	31 Desember 2022
77	SNI 6911:2022 Penanganan Bahan Peledak Komersial yang Aman pada Kegiatan Minyak dan Gas Bumi	SNI 13-6911-2002 Penanganan Bahan Peledak yang Aman di Indonesia - Pelaksanaan	231/KEP/BSN/7/2022	31 Desember 2023
78	SNI 7964:2022 Pembangunan Continously Operating Reference Station (Cors)	SNI 7964:2014 Prosedur Pembangunan Continously Operating Reference Station (Cors)	231/KEP/BSN/7/2022	30 Juni 2023
79	SNI 7188-7:2022 Kriteria Ekolabel - Bagian 7 : Kategori Produk dan Wadah Bioplastik yang Dapat Dikomposkan	SNI 7188.7:2016 Kriteria Ekolabel - Bagian 7: Kategori Produk Tas Belanja Plastik dan Bioplastik Mudah Terurai	229/KEP/BSN/7/2022	Pencabutan SNI Lama
80	SNI 2973:2022 Biskuit	SNI 2973:2018 Biskuit		akan dilakukan rapat lanjutan
81	SNI 6160:2022 Rumah Potong Hewan Unggas	SNI 01-6160-1999 Rumah Pemotongan Unggas	231/KEP/BSN/7/2022	31 Desember 2023
82	SNI 1972:2022 Metode Uji Slump beton Semen Hidraulis	SNI 1972:2008 Metode Uji Slumpbeton	231/KEP/BSN/7/2022	31 Desember 2023
83	SNI 4143:2022 Metode Uji Susut Linier Tanah	SNI 03-4143-1996 Metode Pengujian Susut Linier Tanah	231/KEP/BSN/7/2022	31 Desember 2023
84	SNI 8011:2022 CAT DEKORATIF BERBASIS PELARUT ORGANIK	SNI 8011:2014 CAT DEKORATIF BERBASIS PELARUT ORGANIK		31 Desember 2024

No	SNI Baru	SNI lama	No SK	Status Masa Transisi
85	SNI 2938:2022 TEKSTIL - TOLERANSI DAN SPESIFIKASI BENANG TEKSTUR POLIESTER	SNI 08-2938-1992 BENANG TEKSTUR POLIESTER		30 Juni 2024
86	SNI ISO 13938-1:2019 TEKSTIL - KEKUATAN JEBOL KAIN - BAGIAN 1: CARA UJI KEKUATAN DAN TINGGI PENGEMBUNGAN METODE HIDROLIK	SNI ISO 13938-1:2010 TEKSTIL - KEKUATAN JEBOL KAIN - BAGIAN 1: CARA UJI KEKUATAN DAN PENGEMBUNGAN METODE HIDROLIK		30 Juni 2024
87	SNI ISO 12947-2:2016 TEKSTIL - CARA UJI TAHAN GOSOK KAIN DENGAN METODE MARTINDALE - BAGIAN 2: CARA UJI KERUSAKAN CONTOH UJI	SNI ISO 7888:2013 TEKSTIL - CARA UJI TAHAN GOSOK KAIN DENGAN METODE MARTINDALE - CARA UJI KERUSAKAN CONTOH UJI		30 Juni 2024
88	SNI ISO 105-A03:2019 TEKSTIL - CARA UJI TAHAN LUNTUR WARNA - BAGIAN AOS: SKALA ABU-ABU UNTUK PENILAIAN PENODAAN	SNI ISO 105-A03 :2010 (EDISI 2017), TEKSTIL CARA UJI TAHAN LUNTUR WARNA - BAGIAN AOS: SKALA ABU-ABU UNTUK PENILAIAN PENODAAN		Pencabutan SNI Lama
89	SNI ISO 13938-2:2019 TEKSTIL- KEKUATAN JEBOL KAIN BAGIAN 2: CARA UJI KEKUATAN DAN TINGGI PENGEMBUNGAN METODE PNEUMATIK	SNI ISO 13938-2:2011 TEKSTIL - KEKUATAN JEBOL KAIN - BAGIAN 2: CARA UJI KEKUATAN DAN PENGEMBUNGAN METODE PNEUMATIK		30 Juni 2024
90	SNI ISO13935-2:2014 TEKSTIL- KAIN DAN PRODUK TEKSTIL- CARA UJI KEKUATAN TARIK JAHITAN- BAGIAN 2: METODE CEKAU	SNI ISO13935-2:2012 TEKSTIL- KAIN DAN PRODUK TEKSTIL- CARA UJI KEKUATAN TARIK JAHITAN- BAGIAN 2: METODE CEKAU		30 Juni 2024
91	SNI 122:2022 KERAN AIR SUPLAI UNTUK KEPERLUAN DOMESTIK	SNI 03-0122-1998 KERAN AIR RUMAH TANGGA JENIS KATUP PINTU		31 Desember 2024
92	SNI 9043-1:2022 Pakan Buatan -Bagian 1:Udang Windu (Penaeus monodon, Fabricius1798)	SNI 02.2724-2002 Pakan Buatan untuk Udang Windu (Penaeus monodon)	231/KEP/BSN/7/2022	31 Desember 2023
93	SNI 9043-2:2022 Pakan Buatan -Bagian 2:Udang Vaname (Litopenaeus vannamei,Boone1931)	SNI 7549:2009 Pakan Buatan Untuk Udang Vaname (Litopenaeus vannamei)	231/KEP/BSN/7/2022	31 Desember 2023
94	SNI 9043-4:2022 Pakan Buatan - Bagian 4:Ikan Lele (Clariasspp.)	SNI 01-4087-2006 Pakan Buatan untuk Ikan Lele Dumbo (Clariasgariepinus) Pada Budidaya Intensif	231/KEP/BSN/7/2022	31 Desember 2023
95	SNI 9044-1:2022 Ikan Nila (Oreochromis niloticus)-Bagian 1:Pembesaran di Karamba Jaring Apung (KJA)	6495:2011 Produksi Ikan Nila (Oreochromis niloticus,Bleeker) Pembesaran di Karamba Jaring Apung (KJA)	231/KEP/BSN/7/2022	30 Juni 2023

No	SNI Baru	SNI lama	No SK	Status Masa Transisi
96	SNI 9044-2:2022 Ikan Nila (Oreochromis sp.)- Bagian 2:Pembesaran Secara Semi-Intensif di Tambak	SNI 8006:2014 Produksi Pembesaran Ikan Nila Salin (Oreochromis sp.) di Tambak	231/KEP/BSN/7/2022	30 Juni 2023
97	SNI 7775:2022 Produksi Ikan Hias Koi (Cyprinus nifrofiiscus, Linnaeus 1758)	SNI 7775:2013 Produksi Ikan hias Koi (Cyprinus carpio)	231/KEP/BSN/7/2022	30 Juni 2023
98	SNI 8227:2022 Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)	SNI 8227:2015 Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)	231/KEP/BSN/7/2022	31 Desember 2024
99	SNI 7627:2022 Mutu fisik dan fisiologis benih tanaman hutan	SNI 7627:2014 Mutu fisik dan fisiologis benih tanaman hutan	353/KEP/BSN/9/2022	30 Juni 2023
100	SNI 563:2021 METODE UJI STANDAR UNTUK ABU TOTAL PADA KULIT	SNI 06-0563-1989 KULIT TERSAMAK, CARA UJI KADAR ABU		30 Juni 2024
101	SNI ISO 17229:2016 KULIT - UJI FISIS DAN MEKANIS - PENENTUAN ABSORPSI UAP AIR	SNI ISO 17229:2013 KULIT - UJI FISIS DAN MEKANIS - PENENTUAN PENYERAPAN UAP AIR		31 Desember 2023
102	SNI ISO 4045:2018 KULIT- PENGUJIAN KIMIAWI - PENENTUAN pH DAN PERBEDAAN NILAI	SNI ISO 4045:2011 KULIT - PENGUJIAN KIMIAWI - PENENTUAN pH SNI 06- 0646-1989 KULIT TERSAMAK, CARA UJI pH		30 Juni 2024
103	SNI ISO 5403-2:2011 KULIT - PENENTUAN KETAHANAN AIR KULIT FLEKSIBEL - BAGIAN 2: KOMPRESI ULANG BERSUDUT (MAESER)	SNI ISO 5403:2012 KULIT - METODE UJI FISIS DAN MEKANIS - PENENTUAN KETAHANAN AIR KULIT FLEKSIBEL		31 Desember 2023
104	SNI 7053:2022 MOBIL POMPA PEMADAM KEBAKARAN	SNI 09-7053-2004 KENDARAAN DAN PERALATAN PEMADAM KEBAKARAN - POMPA	353/KEP/BSN/9/2022	31 Desember 2022
105	SNI 2202:2022 SABUK AMPELAS	SNI 15-2202-1991 SABUK PENGAMPELAS - PENANDAAN, DIMENSI DAN TOLERANSI	353/KEP/BSN/9/2022	31 Desember 2023
106	SNI ISO 20481:2008 KOPI DAN PRODUK KOPI - PENENTUAN KADAR KAFEIN MENGGUNAKAN KROMATOGRAFI CAIR KINERJA TINGGI (KCKT) - METODE REFERENSI	SNI ISO 20481:2008 KOPI DAN PRODUK KOPI - PENENTUAN KADAR KAFEIN MENGGUNAKAN HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC) - METODE REFERENSI		Pencabutan
107	SNI 80:2022 CAIRAN KELANTANG	SNI 06-0080-1987 MUTU DAN CARA UJI BLEACHING LIQUOR	353/KEP/BSN/9/2022	30 Juni 2023
108	SNI 1842:2022 PEMBERSIH LANTAI CAIR	SNI 1842:2019 PEMBERSIH LANTAI	353/KEP/BSN/9/2022	31 Desember 2023

No	SNI Baru	SNI lama	No SK	Status Masa Transisi
109	SNI 3721:2022 SERBUK KELANTANG	SNI 06-3721-1995 SERBUK KELANTANG	353/KEP/BSN/9/2022	30 Juni 2023
110	SNI 4904:2022 SERBUK PEMBERSIH PERMUKAAN KERAS	06-4904-1998 SERBUK PEMBERSIH (PENGGOSOK) PERMUKAAN KERAS	353/KEP/BSN/9/2022	30 Juni 2023
111	SNI 7381:2022 MINYAK KELAPA VIRGIN (VIRGIN COCONUT OIL)	SNI 7381:2008 MINYAK KELAPA VIRGIN (VCO)	353/KEP/BSN/9/2022	31 Desember 2024
112	SNI 2970:2022 SUSU BUBUK	SNI 2970:2015 SUSU BUBUK		31 Desember 2024
113	SNI 2971:2022 SUSU KENTAL MANIS	SNI 2971:2011 SUSU KENTAL MANIS		31 Desember 2024
114	SNI 3719:2022 MINUMAN SARI BUAH	SNI 3719:2014 MINUMAN SARI BUAH		30 Juni 2024
115	SNI 7841:2022 PUREE BUAH	SNI 7841:2013 PUREE BUAH	353/KEP/BSN/9/2022	31 Desember 2024
116	SNI 2979:2022 SELAI KACANG	SNI 01-2979-1992 MENTEGA KACANG		31 Desember 2024
117	SNI ISO 11132:2021 ANALISIS SENSORI - METODOLOGI PANDUAN PENGUKURAN KINERJA PANEL SENSORI DESKRIPTIF KUANTITATIF	SNI ISO 11132:2017 ANALISIS SENSORI - METODOLOGI - PANDUAN PEMANTAUAN KINERJA PANEL SENSORI KUANTITATIF	354/KEP/BSN/9/2022	Pencabutan SNI lama
118	SNI 4275:2022 SAUS TIRAM	SNI 01-4275-1996 SAUS TIRAM		31 Desember 2024

Lampiran III

PROGRES PROGRAM NASIONAL REGULASI TEKNIS (PNRT) TAHUN 2022

No	Produk/Jasa/Proses/Sistem	Progress Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan (update Desember 2022)
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
1.	Kualifikasi dan sertifikasi personil UTR (Uji Tak Rusak) Level I dan II	SNI ISO 9712:2014	Uji tak rusak - Kualifikasi dan sertifikasi personil UTR (ISO 9712:2012, IDT)	2022	BATAN/BRIN	-
2.	Profil metadata spasial Indonesia	SNI 8843-1:2019	Profil metadata spasial Indonesia - Bagian 1: Fundamental (ISO 19115-1:2014,MOD)	2022	BIG	Pembahasan progress penerapan SNI 8843-1:2019 secara wajib (18 Oktober 2022)
3.	Pati Jagung	SNI 8523:2018	Pati Jagung	2022	Kementerian Perindustrian	Pembahasan progress PNRT (21 Desember 2022)
4.	Garam Konsumsi Beriodium	SNI 3556:2016	Garam Konsumsi beriodium	2020-2022	Kementerian Perindustrian	-
5.	Kaca Isolasi - Kaca untuk Bangunan	SNI ISO 20492-4:2014 SNI ISO 20492-3:2014 SNI ISO 20492-2:2014	Kaca untuk bangunan - Kaca isolasi - Bagian 4: Metode uji untuk sifat fisik segel tepi (ISO 20492-4: 2010, IDT) Kaca untuk bangunan - Kaca isolasi - Bagian 3: Konsentrasi gas dan kebocoran gas (ISO 20492-3:2010, IDT) Kaca untuk bangunan - Kaca isolasi - Bagian 2: Uji pengkabutan kimia (ISO 20492-2:2008, IDT)	2022	Kementerian Perindustrian	Rapat Pembahasan Skema Sertifikasi 24-26 Agustus 2022 untuk: a) SNI ISO20492-2:2014 Kaca untuk bangunan – Kaca isolasi – Bagian 2: Uji pengkabutan kimia; b) SNI 8801:2019 Kaca Isolasi untuk Ruang dan Lemari Pendingin; dan/atau c) SNI 8822:2019 Kaca Pengaman untuk

No	Produk/Jasa/Proses/Sistem	Progress Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan (update Desember 2022)
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
		SNI ISO 20492-1:2014	Kaca untuk bangunan - Kaca isolasi - Bagian 1: Daya tahan segel tepi dengan uji iklim (ISO 20492-1: 2008, IDT)			Sarana Perkeretaapian.
6.	Bahan Tahan Api Kastabel Jenis Alumina dan Alumina Silikat	SNI 809:2021	Bahan Tahan Api Kastabel Jenis Alumina dan Alumina Silikat	2022	Kementerian Perindustrian	-
7.	Ramming Mix Jenis Samot dan Jenis Kadar Alumina Tinggi	SNI 600:2021	Ramming Mix Jenis Samot dan Jenis Kadar Alumina Tinggi	2022	Kementerian Perindustrian	-
8.	Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara dan Tahan Api dari Mineral Wool	SNI 8421:2017	Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara dan Tahan Api dari Mineral Wool	2020-2022	Kementerian Perindustrian	-
9.	Baja Lembaran Lapis Seng (Bj LS)	SNI 2053:2019	Baja Lembaran Lapis Seng (Bj LS)	2022	Kementerian Perindustrian	-
10.	Baja lembaran lapis seng yang diberi lapisan cat berwarna	SNI 66:2019	Baja lembaran lapis seng warna (Bj LS warna)	2020-2022	Kementerian Perindustrian	-
11.	Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Alumunium-Seng (Bj LAS)	SNI 4096:2019	Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Alumunium-Seng (Bj LAS)	2022	Kementerian Perindustrian	-
12.	Kompur Gas LPG dan LNG/NG Tekanan Rendah untuk Rumah	SNI 8660:2018	Kompur Gas LPG dan LNG/NG Tekanan Rendah untuk Rumah	2022	Kementerian Perindustrian	Evaluasi dan pembahasan rencana revisi pemberlakuan (15 Juni

No	Produk/Jasa/Proses/Sistem	Progress Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan (update Desember 2022)
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
	Tangga		Tangga			2022)
13.	Kompas Gas LPG dan LNG/NG untuk komersial	SNI 7613:2019	Kompas Gas LPG dan LNG/NG untuk komersial	2022	Kementerian Perindustrian	-
14.	Rangka Atap Baja Ringan	SNI 8399:2017	Profil rangka baja ringan	2020-2022	Kementerian Perindustrian	-
		SNI 8399:2017/ Amd1:2019	Profil rangka baja ringan			
15.	Peralatan Masak (Cookware) dari Logam	SNI 8752:2020	Peralatan Masak (Cookware) dari Logam	2022	Kementerian Perindustrian	-
16.	Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak (Flatware) dari Baja Tahan Karat	SNI 8753:2020	Peralatan makan dan perlengkapan masak dari baja tahan karat (Stainless Steel Flatware)	2022	Kementerian Perindustrian	-
17.	Pompa Air Sentrifugal untuk Irigasi	SNI 0141:2009/ Amd2:2015	Pompa air sentrifugal untuk irigasi - Unjuk kerja dan cara uji Amandemen 2	2020-2022	Kementerian Perindustrian	-
18.	AC	SNI IEC 60335-2-40-2009	Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-40: Persyaratan khusus untuk pompa kalor listrik, pengkondisi udara dan pengering udara	2022	Kementerian Perindustrian	-
19.	Kulkas	SNI IEC 60335-2-24-2009	Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-24: Persyaratan khusus untuk peralatan pendingin, peralatan es krim dan pembuat es	2022	Kementerian Perindustrian	-

No	Produk/Jasa/Proses/Sistem	Progress Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				Keterangan (update Desember 2022)
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak Tahun	Instansi	
20.	Mesin Cuci	SNI IEC 60335-2-7:2009	Piranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-7: Persyaratan khusus untuk mesin cuci	2022	Kementerian Perindustrian	-
21.	Showcase	SNI IEC 60335-2-89: 2015	Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-89: Persyaratan khusus untuk peralatan pendingin komersial dengan unit refrigeran atau kompresor tergabung atau terpisah (IEC 60335-2-89:2012, IDT)	2022	Kementerian Perindustrian	-
22.	Baterai Primer	SNI IEC 60086-2-2015	Baterai primer - Bagian 2: Spesifikasi fisik dan listrik (IEC 60086-2:2011, IDT)	2022	Kementerian Perindustrian	-
23.	Pompa Submersible	SNI/IEC 60335-2-41:2010 *	Piranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan khusus untuk pompa	2022	Kementerian Perindustrian	-
24.	Powerbank	SNI 8785:2019	Bank daya (Power Bank) Ion Litium – Bagian 1: Persyaratan umum keselamatan	2022	Kementerian Perindustrian	-

Lampiran IV

PENETAPAN PROGRAM NASIONAL REGULASI TEKNIS (PNRT) TAHUN 2023

No	Produk/Jasa/Proses/Sistem	Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak	Instansi	Keterangan
1.	Pati Jagung	SNI 8523:2018	Pati Jagung	2022	Kementerian Perindustrian	-
2.	Krimer Nabati Bubuk	SNI 4444:2018	Krimer Nabati Bubuk	2023	Kementerian Perindustrian	-
3.	Gula Kristal Rafinasi	SNI 3140-2:2018	Gula kristal – Bagian 2: Rafinasi	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
4.	Kertas Pembentuk Rokok	SNI 3755:2019	Kertas Pembentuk Rokok	2023	Kementerian Perindustrian	-
5.	Garam Konsumsi Beriodium	SNI 3556:2016	Garam Konsumsi Beriodium	2020	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
6.	Bahan Baku Plastik	SNI 8432:2017	Polipropilena kopolimer impak untuk komponen otomotif	2023	Kementerian Perindustrian	-
7.		SNI 8887:2020	Polietilena massa jenis tinggi dengan klasifikasi PE100 untuk aplikasi pipa penyaluran bahan bakar gas	2023	Kementerian Perindustrian	-
8.		SNI 7808:2012	Bijih plastik polietilena	2023	Kementerian Perindustrian	-
9.		SNI 0594:2011	Polipropilena	2023	Kementerian Perindustrian	-
10.		SNI 59:2017	Resin Polivinil Klorida (PVC)	2023	Kementerian Perindustrian	-
11.		SNI 7593:2010	Polietilena massa jenis tinggi (high density polyethylene/HDPE) untuk bahan baku pipa air minum	2023	Kementerian Perindustrian	-

No	Produk/Jasa/ Proses/Sistem	Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak	Instansi	Keterangan
12.	Tanki air silinder vertikal	SNI 7276:2020	Tangki air silinder vertikal – Polietilena (PE)	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
13.	Minyak lumas untuk kendaraan bermotor	SNI 7069-1:2020	Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas – Bagian 1: Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
14.		SNI 7069-2:2021	Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas – Bagian 2: Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
15.		SNI 7069-3:2020	Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas – Bagian 3: Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
16.		SNI 7069-4:2020	Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas – Bagian 4: Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
17.		SNI 7069-5:2021	Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas – Bagian 5: Minyak lumas motor diesel putaran tinggi	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
18.		SNI 7069-6:2021	Klasifikasi dan spesifikasi – Pelumas – Bagian 6: Minyak lumas roda gigi transmisi manual dan gardan untuk kendaraan bermotor	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
19.		SNI 7069-7:2021	Klasifikasi dan Spesifikasi - Pelumas - Bagian 7: Minyak Lumas Transmisi Otomatis	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
20.	Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara, dan Tahan Api dari Mineral Wool	SNI 8421:2017	Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara, dan Tahan Api dari Mineral Wool	2022	Kementerian Perindustrian	-
21.		8421:2017/Amd.1	Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara,	2022	Kementerian	-

No	Produk/Jasa/ Proses/Sistem	Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak	Instansi	Keterangan
		2020	dan Tahan Api dari Mineral Wool Amandemen 1		Perindustrian	
22.	Kaca untuk Bangunan - Kaca Isolasi	SNI ISO 20492-2:2014	Kaca untuk bangunan - Kaca isolasi - Bagian 2: Uji pengkabutan kimia (ISO 20492-2:2008, IDT).	2022	Kementerian Perindustrian	-
23.		SNI 8801:2019	Kaca Isolasi untuk Ruang dan Lemari Pendingin	2023	Kementerian Perindustrian	-
24.		SNI 8822:2019	Kaca Pengaman untuk Sarana Perkeretaapian	2023	Kementerian Perindustrian	-
25.	Aki	SNI 0038:2009	Aki untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih	2023	Kementerian Perindustrian	-
26.		SNI 4326:2013	Aki untuk kendaraan bermotor kategori L	2023	Kementerian Perindustrian	-
27.	Kompore	SNI 8660:2018	Kompore Gas LPG dan LNG/NG Tekanan Rendah untuk Rumah Tangga	2022	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
28.		SNI 7613:2019	Kompore Gas LPG dan LNG/NG untuk Komersil	2022	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
29.	Baja lembaran lapis seng yang diberi lapisan cat berwarna	SNI 66:2019	Baja lembaran lapis seng warna (Bj LS warna)	2020	Kementerian Perindustrian	-
30.	Baja lembaran lapis seng (Bj LS)	SNI 2053:2019	Baja lembaran lapis seng (Bj LS)	2022	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
31.	Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium- Seng (Bj LAS)	SNI 4096:2019	Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj LAS)	2022	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
32.	Peralatan Masak (Cookware) dari	SNI 8752:2020	Peralatan Masak (Cookware) dari Logam	2022	Kementerian Perindustrian	-

No	Produk/Jasa/ Proses/Sistem	Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak	Instansi	Keterangan
	Logam					
33.	Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak (Flatware) dari Baja Tahan Karat	SNI 8753:2020	Peralatan makan dan perlengkapan masak dari baja tahan karat (Stainless Steel Flatware)	2022	Kementerian Perindustrian	-
34.	Alat Pemadam Api Portabel	SNI 180:2021 dan revisinya	Alat Pemadam Api Portabel (APAP)	2023	Kementerian Perindustrian	-
35.	Katup Tabung LPG	SNI 1591:2016	Katup Tabung LPG	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
36.	Pompa air sentrifugal untuk irigasi	SNI 141:2020	Pompa air sentrifugal untuk irigasi – Unjuk kerja dan metode uji	2020	Kementerian Perindustrian	-
37.	Kulkas	SNI IEC 60335-2-24:2009	Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-24. Persyaratan khusus untuk peralatan pendingin, peralatan es krim dan pembuat es	2022	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
38.	AC	SNI IEC 60335-2-40:2009	Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-40: Persyaratan khusus untuk pompa kalor listrik, pengkondisi udara dan pengering udara	2022	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
39.	Mesin cuci	SNI IEC 60335-2-7:2010	Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-7: Persyaratan khusus untuk mesin cuci	2022	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
40.	Showcase	SNI IEC 60335-2-89: 2015	Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-89:	2022	Kementerian Perindustrian	-

No	Produk/Jasa/ Proses/Sistem	Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak	Instansi	Keterangan
			Persyaratan khusus untuk peralatan pendingin komersial dengan unit refrigeran atau kompresor tergabung atau terpisah (IEC 60335-2-89:2012, IDT)			
41.	Baterai	SNI IEC 60086-2:2015	Baterai primer – Bagian 2: Spesifikasi fisik dan listrik (IEC 60086-2:2015, IDT)	2022	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
42.	Power Bank	SNI 8785:2019	Bank Daya (Power Bank) Ion Litium - Bagian 1 : Persyaratan Umum Keselamatan	2022	Kementerian Perindustrian	-
43.	Mainan	SNI 8580—1:2018 ISO 8124—1: 2014	Keamanan mainan — Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis (ISO 8124:2014, IDT)	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
44.		SNI 8580-2:2018 ISO 81242: 2014	Keamanan mainan — Bagian 2: Sifat mudah terbakar (ISO 8124-2:2014, IDT)	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
45.		SNI 8580-3:2018 ISO 8124-3. 2010	Keamanan mainan — Bagian 3: Migrasi unsur tertentu (ISO 8124-3:2010 dan ISO 8124-3:2010/ Amd.1:2014, IDT)	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
46.		SNI 8580-4:2018 ISO 8124-4: 2014	Keamanan mainan — Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal (ISO 8124-4:2014, IDT)	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
47.		SNI 8579:2018 IEC 62115:2017	Mainan elektrik - Keamanan (IEC 62115: 2017, IDT, Eng)	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
48.	SNI 8578:2018	Persyaratan mutu dan metode uji kandungan ftalat dalam produk mainan anak berbahan plastik	2023	Kementerian Perindustrian	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI	

No	Produk/Jasa/Proses/Sistem	Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak	Instansi	Keterangan
49.	Sistem Jaminan Kuantitas Untuk Akuntabilitas dan Transparansi Alir Kuantitas Sub Bidang Migas	SNI 9040:2021	Sistem Jaminan Kuantitas Untuk Akuntabilitas dan Transparansi Alir Kuantitas Sub Bidang Migas-Persyaratan	2023	Kementerian ESDM	-
50.	Sarden dan makerel dalam kemasan kaleng	SNI 8222:2016	Sarden dan makerel dalam kemasan kaleng	2023	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
51.	Tuna dalam kemasan kaleng	SNI 8223:2016	Tuna dalam kemasan kaleng	2023	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Revisi Peraturan Pemberlakuan Wajib SNI
52.	Metadata	SNI 8843-1:2019	Profil metadata spasial Indonesia - Bagian 1: Fundamental (ISO 19115-1:2014,MOD)	2022	Badan Informasi dan Geospasial	Dengan Pemenuhan Acuan Normatif: - SNI ISO 19115-2-2019 (Ditetapkan oleh BSN pada Tahun 2020), Informasi geografis – Metadata – Bagian 2: Ekstensi untuk akuisisi dan pemrosesan (ISO 19115-2:2019, IDT) - SNI ISO 19115-3:2016 (Ditetapkan oleh BSN pada Tahun 2021) Informasi geografis – Metadata – Bagian 3: Skema implementasi XML untuk konsep fundamental (ISO/TS 19115- 3:2016, IDT) - SNI ISO 19157:2015 Informasi geografis – Kualitas data (ISO

No	Produk/Jasa/ Proses/Sistem	Rencana Penyusunan Regulasi Teknis/Pemberlakuan SNI secara wajib				
		Nomor SNI	Judul SNI	Usulan sejak	Instansi	Keterangan
						19157:2013, IDT) - SNI ISO 19157-2: 2016 (Ditetapkan oleh BSN pada Tahun 2020) Informasi geografis – Kualitas data – Bagian 2: Implementasi skema XML (ISO/TS 19157- 2:2016,IDT

LAMPIRAN V Perkembangan perundingan/kesepakatan Internasional bidang SPK

No	Forum Perundingan	Nama Forum	Status (implementasi/Ongoing)
1	Bilateral	IA CEPA	Implementasi
2		IEFTA CEPA	Implementasi
3		IUAEC CEPA	<i>Final negotiation</i>
4		IETO TETO Indonesia -Taiwan	<i>Final negotiation</i>
5		IEU CEPA	<i>On-Going negotiation</i>
6		ICA CEPA	<i>On-Going negotiation</i>
5	Regional	ACCSQ Plenary	<i>On-Going negotiation</i>
6		ACFTA	Implementasi
7		RCEP	Ratifikasi
8		AANZFTA	Implementasi
9	Multilateral	WTO TPR	Implementasi
10		WTO TFA	Penyusunan mekanisme
11		UNFSS	Kajian Penerapan VSS

